

**NEW MEDIA DAN TRANSFORMASI GERAKAN SOSIAL TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DI ERA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**TAUFIK
NIM. 150801005**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
BANDA ACEH TAHUN 2020/2021**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**“NEW MEDIA DAN TRANSFORMASI GERAKAN SOSIAL TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DI ERA PANDEMI COVID-19”**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

TAUFIK
NIM. 150801005

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Banda Aceh, 2021

Disetujui untuk Disidangkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A.
NIP.197309212000032004

Rizkika Lhena Darwin. M.A
NIP.198812072018032001

**NEW MEDIA DAN TRANSFORMASI GERAKAN SOSIAL TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DI ERA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-I) Ilmu Politik

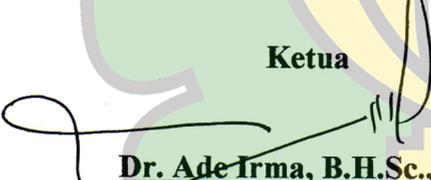
Diajukan Oleh :

TAUFIK
NIM. 150801005

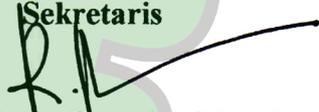
Pada Hari / Tanggal : Selasa, 3 Agustus 2021
24 Dzulhijah 1442

Di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA
NIP. 1973092120000032004

Sekretaris


Rizkika Lhena Darwin, S.Ip., MA
NIP. 198812072018032001

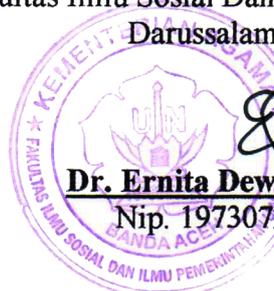
Penguji I


Muhammad Thalal, Lc, M.S, M.Ed
NIP. 197810162008011011

Penguji II


Ramzi Murziqin, M.A
NIP. 198605132019031006

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry
Darussalam- Banda Aceh




Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum
Nip. 197307232000032002

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIK
NIM : 150801005
Prodi : Ilmu Politik
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul Skripsi : New Media Dan Tranformasi Gerakan Sosial Terhadap Kebijakan Pemerintah Aceh Di Era Pandemi Covid-19

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Agustus 2021
Yang menyatakan,



Taufik

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “New Media Dan Tranformasi Gerakan Sosial Terhadap Kebijakan Pemerintah Aceh Di Era Pandemi Covid-19”. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar Raniry Banda Aceh. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK.,MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Ernita Dewi, S. Ag. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Politik dan selaku penasehat akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Ibu Rizkika Lhena Darwin, MA. Selaku sekretaris Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar Raniry Banda Aceh, khususnya Prodi Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu dan perhatiannya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu Rizkika Lhena Darwin, MA dan Ibu Dr. Ade Irma, B.H.Sc.,M.A selaku pembimbing penulis.

7. Kepada informan yang telah banyak membantu penulis untuk mendapatkan informasi yang penulis butuhkan.
8. Skripsi ini teristimewa penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Muhammad Gade dan ibunda Asmawati S.Pd.i. Juga kepada saudara kandung penulis yaitu Abdul Hadi S.Pd, Mastura S.Pd.i, Lisa Uliya B.Ing dan Muhammad Zainunis. yang selalu menyemangati dan memberikan dukungan berupa doa, nasihat, maupun materi dalam proses perkuliahan dan juga penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat tersayang yaitu Iskandar, Nazarullah, Mirsal, Taqwadin Marzuki, Dia Ulhaq, Muhammad Ikbal serta seluruh Mahasiswa Prodi Ilmu Politik angkatan 2015 lainnya yang ikut memberikan motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga Allah Swt membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 3 Agustus 2021

Penulis,

Taufik

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	8
3.1 Pembahasan Penelitian Yang Relevan.....	24
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Lokasi Penelitian.....	28
3.3 Sumber Data	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5 Informan.....	31
3.6 Teknik Analisi Data	32
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Profil Provinsi Aceh : Kondisi Sosial dan Ekonomi	35
4.2 Transformasi Pergerakan Civil Society di Era Pandemi Covid 19.....	38
4.3 Kebijakan Pemerintah pada Masa Pandemi.....	43
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	47
6.1 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	68

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Instrumen Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Masa pandemi membawa tantangan besar bagi para aktivis gerakan sosial progresif. Pemerintah melakukan upaya yang beragam dalam mengurangi angka penyebaran covid 19. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh di Era Pandemi kerap mendapatkan kritik dari berbagai kalangan perihal beberapa kebijakan yang diterapkan. Dalam hal ini, peran masyarakat dalam penggunaan *new media* sebagai sebuah bentuk gerakan sosial yang baru bertujuan untuk mencapai *balance of power* (antara pemerintah dan masyarakat) yang seimbang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan analisis isi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah responden wawancara sebanyak 7 orang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa transformasi pergerakan *civil society* di era pandemi covid 19 telah mengalami perubahan dimana sebelum masa pandemi masyarakat menggunakan cara konvensional sebagai suatu aksi gerakan sosial. Di masa pandemi masyarakat menggunakan media sosial sebagai alternatif dalam melakukan aksi-aksi gerakan sosial. Peran *civil society* dalam mengelola *new media* untuk mengorganisir transformasi gerakan sosial dapat dilihat dari keaktifan masyarakat menggunakan media sosial sebagai media baru dalam melakukan aksi gerakan sosial seperti *facebook* dan *instagram*.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Media baru (*New Media*) adalah sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan. “Media baru memiliki dua unsur utama yakni digitalisasi dan konvergensi. Internet merupakan bukti konvergensi karena menggabungkan beberapa fungsi media lain seperti audio, video, dan teks.¹

Teori *uses and gratification* berasumsi bahwa “khalayak pada dasarnya bersifat aktif, selektif dan *goal oriented* dalam menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Media massa berkompetisi dengan sumber-sumber lainnya (saluran komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, dan sebagainya) dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan khalayak.²

Saat ini, memahami eksistensi media pemberitaan tidak cukup hanya dengan mengkaji cara kerja praktisi serta khalayak dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi. Hal tersebut memerlukan juga penelusuran tentang perubahan konsep media pemberitaan yang dipengaruhi perkembangan teknologi pendukungnya. Konsep media senantiasa mengikuti dinamika peradaban manusia yang saat ini telah memasuki era masyarakat informasi.³

¹ Mc Quail, Denis. 2006. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Alih bahasa oleh Agus Dharma dan Aminudin Ram. Jakarta: Erlangga.

² Effendy, Onong Uchyana. 2000. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

³ Aoyama, Y., and Castells, M. (2002). An Empirical assessment of the Informational Society. *International Labour Review*, 141. Geneva: ILO.

Masa pandemi membawa tantangan besar bagi para aktivis gerakan sosial progresif. Saat ini bukan lagi waktu yang tepat untuk aktivisme jalanan atau gerakan politik dialun-alun dan di jalanan. Kebebasan dibatasi, Pembatasan sosial (*social distancing*) membuat protes publik yang khas seperti pengerahan massa sulit dilakukan. Mobilisasi tidak hanya sulit ditempat-tempat umum, tetapi juga di tempat kerja kita, mengingat pembatasan yang sangat ketat terhadap hak publik untuk bertemu dan berkurangnya kesempatan untuk pertemuan tatap muka. Hal ini menjadi ketergantungan pada efisiensi pemerintah dan pendapat ahli serta pemanfaatan media yang ada untuk tetap up to date melakukan berbagai aktivitas.⁴

Selama masa *physical distancing* penggunaan internet meningkat cukup signifikan. Selain itu terjadi pergeseran dari lingkungan perkantoran ke lingkungan pemukiman.

*“Penggunaan internet yang tadinya berpusat di perkantoran kini lebih banyak digunakan di pemukiman dan meningkat sekitar 30 hingga 40 persen. Selain itu, penggunaan pada daerah tertinggal juga memiliki peningkatan sebesar 23 persen. Artinya, sudah banyak warga yang mengikuti anjuran untuk physical distancing yaitu bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah,” jelas Staf Khusus Bidang Kebijakan Digital dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo, Dedy Permadi, saat acara Siberkreasi Hangout Online bertema From Offline to Online yang disiarkan secara daring di Youtube Siberkreasi, Kamis (16/04/2020).*⁵

Berbagai macam upaya Pemerintah Aceh dalam menangani Covid 19 sejak awal tahun 2020 mulai dari pendidikan daring, penutupan tempat keramaian,

⁴ Porta, Donatella Della. “Social movements in times of pandemic: another world is needed”, March 26, 2020. [Di akses pada 20 September 2020 <https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/social-movements-times-pandemic-another-world-needed/>]

⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Inodnesia. 17 april 2020. Di akses tanggal 1 oktober 2020 [https://www.kominfo.go.id/content/detail/25881/penggunaan-internet-naik-40-saat-bekerja-dan-belajar-dari-rumah/0/berita_satker]

larangan membuat keramaian dan lainnya hingga Penerapan jam malam yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat saat, ini berdasarkan Maklumat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh tentang Penerapan Jam Malam dalam Penanganan COVID-19. Dalam maklumat ini ditandatangani oleh seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diantaranya Plt Gubernur Aceh, Ketua DPR Aceh, Kapolda Aceh, Pangdam Iskandar Muda dan Kajati Aceh.⁶

Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 9/2020 tentang perubahan atas keputusan Presiden nomor 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona COVID-19, Maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona (COVID-19) dan keputusan Gubernur Aceh Nomor 360/969/2020 tentang penetapan status tanggap darurat skala provinsi untuk penanganan COVID19. Namun, akibat desakan dari berbagai pihak selanjutnya Pemberlakuan jam malam di Aceh resmi dicabut. Hal itu ditandai dengan terbitnya Maklumat Bersama Forkopimda Aceh Tentang Pencabutan Penerapan Jam Malam dan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 yang ditandatangani, Sabtu, 4 April 2020 setelah sempat berlaku beberapa waktu.⁷

Sangatlah wajar ketika upaya yang beragam dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi angka penyebaran covid 19. Karena situasi yang semakin sulit di kendalikan akibat masyarakat mengabaikan aturan, laporan Perkembangan

⁶ Rahayu, Lisye Sri. "Usai Dikritik, Pemprov Aceh Evaluasi Kebijakan Jam Malam di Masa Pandemi Corona". 3 maret 2020. [di akses pada tanggal 20 september 2020 <https://news.detik.com/berita/d-4964661/usai-dikritik-pemprov-aceh-evaluasi-kebijakan-jam-malam-di-masa-pandemi-corona>]

⁷ Badan Penanggulangan Bencana Aceh. "Penerapan Jam Malam di Aceh Resmi Dicabut". 4 april 2020. [diakses pada tanggal 21 september 2020 <https://bpba.acehprov.go.id/index.php/news/read/2020/04/04/696/penerapan-jam-malam-di-aceh-resmi-dicabut.html>]

Covid-19 Aceh, Selasa 06 Oktober 2020. Dalam Perawatan 1869 Pasien, Sembuh 3108 Pasien, Meninggal Dunia 203 Pasien.⁸

Kemudian gerakan sosial yang merupakan suatu bentuk aksi bersama yang bertujuan untuk melakukan reorganisasi sosial, baik yang diorganisir secara rapi maupun secara cair dan informal. *Framing* (pembingkaiian) merupakan suatu bentuk cara pandang individu terhadap fenomena yang dipengaruhi oleh ideologi di dalam dirinya. ketika beberapa orang dengan kepentingan laten (tidak disadari) yang sama saling bercakap-cakap, maka kepentingan laten mereka seringkali muncul ke kesadaran. Selanjutnya, arus informasi yang tidak lancar telah menyebabkan terjadinya prasangka⁹.

Pemerintah Aceh di Era Pandemi kerab mendapatkan kritik dari berbagai kalangan perihal beberapa kebijakan yang diterapkan. Seperti halnya maklumat pembatasan jam malam yang mendapat kritik keras dari masyarakat melalui media contohnya di *Facebook*, *Instagram*, dan media publikasi lainnya, yang kemudian maklumat itu kembali di cabut oleh Pemerintah Aceh. Aksi protes terhadap Pemerintah Aceh tidak berhenti disitu saja, berbagai kalangan *civil society* mulai melakukan petisi-petisi sebagai wujud tranformasi perubahan gaya protes melalui media, yang kemudian gerakan social kembali dilakukan di depan kantor Gubernur Aceh karena merasa geram terhadap kebijakan Pemerintahan Aceh di nilai tidak pro kepada rakyat. Aliansi mahasiswa juga turun ke jalanan melakukan aksi dengan berbagai tuntutan yang salah satunya adalah mengenai

⁸ Google Berita. 6 Oktober 2020. Statistik Penyebaran Covid 19. [Diakses tanggal 7 oktober 2020
https://news.google.com/covid19/map?hl=id&mid=%2Fm%2F016wj_&gl=ID&ceid=ID%3Aid]

⁹ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. *Teori konflik sosial* ;penerjemah Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto

transparansi dana Covid 19 karena merasa protes yang mereka lakukan melalui media tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak pemerintah.¹⁰

Dalam tahapan ini urgensi peran media terhadap sebuah gerakan sosial tidak dapat dipisahkan. Dalam beberapa hal, media berperan sebagai wadah pemberitaan isu social maupun melakukan framing pemberitaan sosial.¹¹ Pandemi yang disebabkan oleh penyebaran virus Covid-19 ini nampaknya masih akan menjadi permasalahan dunia untuk beberapa waktu ke depan.¹² Dan tanpa *balance of power* (antara pemerintah dan masyarakat) yang seimbang, akan melanggengkan satu pihak (pemerintah) bertindak seenaknya mengamankan kepentingan realpolitik para elit dan pemodalnya.¹³

Untuk dapat melihat secara keseluruhan bagaimana pemamfaatan media social dalam proses transformasi gerakan social, konsep dasar dalam gerakan social menurut Macionis (2014) . dimana terbagi menjadi empat tahanan dalam proses gerakan social yang terdiri dari :¹⁴

1. *Emergence* (Tahap Kemunculan)
2. *Coalescence* (Tahap Penggabungan)
3. *Bureaucratization* (Tahap Formualisasi)
4. *Decline* (Tahap Penurunan atau Hasil Akhir)

¹⁰ Aldevan Fahzian. 10 september 2020. "Warga Demo dan Paparkan 30 Dosa Plt Gubernur Aceh". Diakses tanggal 23 september 2020 [<https://www.tagar.id/warga-demo-dan-paparkan-30-dosa-plt-gubernur-aceh>]

¹¹ Greenwood, K., & Jenkins, J. (2015). *Visual Framing Of The Syrian Conflict In News And Public Affairs Magazines*. Journalism Studies, 16. 2

¹² Jamie Ducharme, "World Health Organization Declares COVID-19 a 'Pandemic.' Here's What That Means", Time Online, 11 Maret 2020 [Diakses dari <https://time.com/5791661/who-coronaviruspandemic-declaration/> pada 19 April 2020].

¹³ Taqwadin A, Danil, "New Normal & Masa Depan Gerakan Sipil di Aceh". Bagbudig. 15 Mei 2020, [Diakses dari <https://bagbudig.com/new-normal-masa-depan-gerakan-sipil-di-aceh/> pada tanggal 20 Juni 2020]

¹⁴ Macionis, John J. 2014. Sociology, 15th Ed. New Jersey: Pearson. Hal 686

Menilik kembali dari berbagai persoalan dan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan media baru mampu digunakan untuk menunjang pelaksanaan pada suatu gerakan sosial. Tentunya tuntutan masyarakat disaat pandemi melalui media sangat gencar dilakukan akibat dari berbagai polemik yang ditimbulkan oleh kebijakan yang dinilai salah kaprah baik dari kalangan aktivis maupun *civil society*, perubahan gerakan social yang dilakukan didalam ruang virtual diharapkan memberi efek pertimbangan bagi Pemerintah Aceh sebagai bahan pertimbangan keputusan dalam membuat kebijakan, apalagi ini menjadi sangat berguna bagi Pemerintah Aceh untuk berhasil melaksakan tugasnya dalam menerapkan *social distancing*.

Berdasarkan wawancara pra-penelitian oleh peneliti dengan salah seorang dosen UIN Ar-Raniry melalui via *Whatsapp* dikarenakan *social distancing*, beliau menemukan fenomena transformasi gerakan sosial dengan strategi protes target pemerintah, mulai meninggalkan mekanisme jalanan dan menggunakan mekanisme media sosial. perbedaan efektivitasnya besar antara gerakan protest melalui dunia maya dengan dunia nyata.¹⁵ Penelitian ini akan membahas bagaimana setiap tahapan tranformasi gerakan social dalam perkembangannya di era *new media*. Konsep gerakan sosial yang telah di kenal sejak lama mengalami pergeseran semenjak digunakannya new media sebagai medium penyebarannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pemamfaatan new media dalam gerakan sosial.

¹⁵ <https://web.whatsapp.com/>

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

- A. Bagaimana Tranformasi Pergerakan *Civil Society* di Era Pandemi Covid 19?
- B. Bagaimana peran *Civil Society* dalam mengelola New Media untuk mengorganisir Tranformasi Gerakan Sosial di Era Pandemi Covid 19?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun untuk memberikan gambaran yang jelas tentang dasar penelitian yang penulis lakukan, maka perlu adanya tujuan penelitian yang harus di tetapkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- A. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana Tranformasi Pergerakan *Civil Society* di Era Pandemi Covid 19
- B. Bagaimana peran *Civil Society* dalam mengelola New Media untuk mengorganisir Tranformasi Gerakan Sosial di Era Pandemi Covid 19

1.4. Mamfaat Penelitian

Berdasarkan *New Media* Dan Tranformasi Gerakan Sosial Terhadap Kebijakan Pemerintah Aceh Di Era Pandemi Covid-19, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan dukungan juga motivasi yang kuat serta keinginan untuk mengembangkan Ilmu Politik.
- 2) Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah sebuah pendukung dan

pengembangan dari teori-teori politik yang ada dan juga memperkaya kajian ilmiah tentang *New Media* Dan Tranformasi Gerakan Sosial Terhadap Kebijakan Pemerintah Aceh Di Era Pandemi Covid-19

- 3) Penelitian ini bermamfaat bagi penulis, yaitu untuk memperluas dan memperdalam pemahaman penulis dalam bidang terspesialisasi. Melatih penulis dalam membuat sebuah karya ilmiah, dan melalui penelitian ini penulis di biasakan untuk lebih banyak membaca dan memahami serta lebih kritis terhadap sebuah bacaan maupun karya tulis yang ada.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

A. *New Media*

Munculnya istilah media baru atau *New Media* di akhir tahun 1980-an membuat dunia media dan komunikasi terlihat sangat berbeda. Perkembangan media dari media konvensional hingga media baru atau *New Media*, turut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia (aspek ekonomi, sosial dan budaya). Kehadiran *New Media* tidak lepas dari perkembangan teknologi yang sifatnya dinamis. Di era *New Media*, perubahan bentuk, produksi, distribusi dan konsumsi media terlihat sangat kompleks.¹⁶

Menurut Roger Fidler (2003) dalam bukunya “*Mediamorfosis*”, media baru atau *New Media* merupakan perubahan media lama (*old media*) yang bertransformasi dan beradaptasi melalui suatu rangkaian proses yang disebut dengan *mediamorphosis*. Dimana, *new media* atau media baru sering disebut juga transformasi media konvensional ke media online atau media daring (media dan jaringan) yang memudahkan khalayak dalam mencari dan mendapatkan informasi secara cepat, real time dan bersifat *mobile*, tidak bisa diperoleh di media konvensional. Khalayak dapat memanfaatkan teknologi internet untuk mengakses informasi dari manapun dan kapanpun secara cuma-cuma.¹⁷

¹⁶ Efendi et al. 2017. *Analisis Pengaruh Penggunaan Media Baru Terhadap Pola Interaksi Sosial Anak Di Kabupaten Sukoharjo*. *Jurnal Penelitian Humaniora*. Vol. 18, No. 2

¹⁷ Sihabudin, Ahmad. 2017. *Mediamorfosis Pers di Era Digital*. Diakses pada 16 maret 2017 dari <http://epaper.kabar-banten.com/read.php?page=20170215>

Media baru (*New media*) yang memiliki definisi “*unique forms of digital media, and the remaking of more traditional media forms to adopt and adapt to the new media technologies*”. Media baru adalah segala sesuatu yang berbasis internet dan teknologi digital, seperti handphone/smartphone berikut seluruh fiturnya, media sosial, kamera digital, DVD/ CD player, radio-net, *video game*, *file sharing software*, serta seluruh aktivitasnya mulai dari memotret, mengirimkan e-mail, SMS, *file sharing*, *upload*, *download*, *posting*, *updating*, *networking*, dan sebagainya.

Frank Biocca dalam Littlejohn menyatakan bahwa karakteristik eksposur atau terpaan media dapat diukur melalui dimensi-dimensi berikut:¹⁸

- *Selectivity* (kemampuan memilih) yaitu kemampuan *audience* dalam menetapkan pilihan terhadap media dan isi yang akan dieksposnya.
- *Intentionally* (kesengajaan) yaitu tingkat kesengajaan *audience* dalam menggunakan media atau kemampuan dalam mengungkapkan tujuan-tujuan penggunaan media.
- *Utilitarianism* (pemanfaatan) yaitu kemampuan *audience* untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan media.
- *Involvement* (keterlibatan) yaitu keikutsertaan pikiran dan perasaan *audience* dalam menggunakan media dan pesan media yang diukur dari frekuensi maupun intensitas.
- *Previous to influence*, yaitu kemampuan untuk melawan arus pengaruh media.

¹⁸ Littlejohn, Stephew W. 1999. *Theories of Human Communication. 6 th Edition*. Belmont CA : Wadsworth Publishing Company

Berikut merupakan *New Media*:

1. Facebook

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Menurut data dari Webershandwick, perusahaan public relations dan pemberi layanan jasa komunikasi, untuk wilayah Indonesia ada sekitar 65 juta pengguna *facebook* aktif. Sebanyak 33 juta pengguna aktif perharinya, 55 juta pengguna aktif yang memakai perangkat mobile dalam pengaksesannya perbulan dan sekitar 28 juta pengguna aktif yang memakai perangkat mobile per harinya.¹⁹

Menurut Hengky Alexander Mangkulo, sebelum menggunakan *facebook* sebagai media yang akan digunakan menjadi sarana penunjang proses belajar mengajar, terlebih dahulu dibuat sebuah desain fungsi yang dapat diaplikasikan pada sistem pembelajaran online yaitu untuk penyampaian materi pelajaran, untuk melakukan diskusi, mengekspresikan diri dan hal lainnya.

2. Instagram

Instagram adalah sebuah bentuk dari *New Media* (media baru) untuk berbagi foto dan video, menyediakan pengguna untuk mengambil foto Dan video dengan menerapkan filter digital serta memberikan keterangan yang

¹⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Inodnesia. 17 april 2020. Di akses tanggal 1 oktober 2020
[https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker]

sering disebut caption dan pengguna dapat berbagi informasi. Instagram di ciptakan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger pada Oktober 2010 dari Facebook inc.²⁰

Beberapa hal bahwasanya *instagram* berhubungan dengan *new media*, yaitu adanya komunitas *instagram*. Dimana aktifitas dari pengguna lebih sering untuk menyukai sebuah foto ataupun video dan memberikan komentar terhadap foto atau video tersebut. Dari situlah penggunapun berkomunikasi antara satu dengan lainnya, dengan adanya komunitas tersebut semangat mendapatkan sebuah tanggapan dari pengguna lainnya menjadi hal yang penting ketika mengunggah foto.²¹

Dalam proses media digital semua data input diubah menjadi angka. Data tersebut sebenarnya analog yang diproses dan disimpan dalam bentuk angka serta dapat dihasilkan dalam bentuk *online*, disk digital atau *drive memory* sehingga *output*-nya berupa teks tertulis, grafik dan diagram, foto serta gambar bergerak yang direkam.

Ketika media konvensional memberikan penawaran pasif, *new media* justru memberikan penawaran interaktivitas. Menjadi interaktif menandakan pengguna interaktivitas *new media* mampu campur tangan atau terlibat secara langsung dalam mengubah gambar dan teks yang mereka akses.

²⁰ Frommer, Dan. 2011. *Here's How To Use Instagram*. Business insider

²¹ Atmoko Dwi, Bambang. 2012. *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*. Jakarta: Media Kita

B. Tranformasi Sosial

Kata transformasi berasal dari bahasa Inggris *transform* yang berarti mengendalikan suatu bentuk ke bentuk lain. Jadi transformasi sosial berarti membicarakan tentang proses perubahan struktur, sistem sosial, dan budaya. Transformasi disatu pihak dapat bermakna proses perubahan atau pembaharuan struktur sosial, sedangkan di pihak lain mengandung arti proses perubahan nilai. Manusia hidup didunia yang senantiasa berubah, kebiasaan dan aturan-aturan kesusilaan, hukumnya, lembaga-lembaga terus berubah. Semua perubahan tersebut mengakibatkan perubahan yang lain terjadi secara timbal balik. masyarakat dan budayanya terus mengalami perubahan.²²

Transformasi secara umum menurut kamus (*The New Grolier Webster Internasional dictionary of English Language*), Menjadi bentuk yang berbeda namun mempunyai nilai-nilai yang sama, perubahan dari satu bentuk atau ungkapan menjadi suatu bentuk yang mempunyai arti atau ungkapan yang sama mulai dari struktur permukaan dan fungsi.

Transformasi menurut Webster Dictionary, 1970. Transformasi berarti perubahan menjadi sesuatu, transformasi dapat dianggap sebagai sebuah proses pemalihan total dari suatu bentuk menjadi sebuah sosok baru yang dapat diartikan sebagai tahap akhir dari sebuah proses perubahan, sebagai sebuah proses yang dijalani secara bertahap baik faktor ruang dan waktu yang menjadi hal yang sangat mempengaruhi dalam perubahan tersebut.

²² Mayor Polak, Sosiologi, Ikhtiar Baru Jakarta, 1985, hal. 385.

Terjadinya transformasi sosial perubahan dalam masyarakat terjadi melalui pengenalan unsur-unsur baru. Unsur-unsur baru ini diperkenalkan kepada masyarakat dalam dua cara, yaitu dengan penemuan baru (invensi) yang terjadi dalam masyarakat itu dan masuknya pengaruh masyarakat lain.²³ Menurut Syamsir Salam, suatu proses perubahan tentang struktur dan fungsi sistem- sistem sosial setidaknya terjadi dalam tiga tahap:

1. Invensi

yakni suatu proses dimana perubahan itu didasari dari dalam masyarakat itu sendiri, diciptakan oleh masyarakat itu sendiri yang kemudian muncullah perubahan- perubahan.

2. Diffusi

Dimana ide-ide atau gagasan yang didapat dari luar itu kemudian dikomunikasikan dalam suatu masyarakat.

3. Konsekuensi

yaitu adanya hasil dari pada adopsi terhadap perubahan tersebut. Suatu perubahan yang terjadi baik dari faktor- faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri maupun berasal dari luar masyarakat itu (hasil teknologi baru) tidak selalu menghasilkan akibat- akibat yang sama. Adakalanya terjadi perubahan kecil yang dampaknya kurang berarti, akan tetapi telah terjadi suatu perubahan. Disisi pihak lainnya akan terlihat bahwa dalam berbagai bidang perubahan terjadi dengan lambat sekali di dalam suatu masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh para

²³ Adham Nasution, 1983. *"Sosiologi"*, Alumni, Bandung

pemimpinnya. Dari suatu proses perubahan akan lebih mudah terjadi apabila masyarakat yang bersangkutan bersikap terbuka terhadap hal-hal atau masalah baru baik dari luar maupun dari dalam.²⁴

Transformasi sosial dapat terjadi dengan sengaja dan memang dikehendaki oleh masyarakat. Sebagai contoh, diprogramkannya untuk pembangunan supaya yang tidak menyenangkan menjadi keadaan yang disenangi; kemiskinan diubah menjadi kesejahteraan, budaya pertanian diubah menjadi budaya industri. Dengan direncanakan bentuk transformasi yang disengaja ini manajemennya lebih jelas, karena dapat diprogramkan dengan melihat perubahan-perubahan yang terjadi.

Teori Marxian misalnya melihat struktur sosial sebagai variabel paling signifikan yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Dengan dua teori besarnya mengenai materialisme historis dan determinisme ekonomi, teori-teori marxian menganggap bahwa struktur sosial-lah yang menentukan corak struktur teknik dan struktur budaya. Dalam setiap masyarakat, begitu menurut pandangan marxian, selalu terdapat kelas sosial yang menguasai alat produksi. Dari struktur-struktur sosial yang terbentuk karena stratifikasi kelas ini, muncullah struktur teknik dalam bentuk organisasi-organisasi sosial yang pada akhirnya juga mempengaruhi terbentuknya simbol-simbol budaya.²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto, 1981. *Memperkenalkan Sosiologi*, Rajawali Press, Jakarta

²⁵ Kuntowijoyo, 1994. *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, Mizan, Bandung

Paradigma Modern Teori- teori Perubahan sosial

(Marx, Weber, Durkheim)²⁶

Marx	Struktur Sosial (Kelas, eksploitasi, alienasi)	Struktur teknik Kekuasaan Kelas melalui negara	Struktur Budaya (Dominasi intelektual, estetika, nilai)
Weber	Struktur Teknik (dominasi otoritas: Kekuasaan kaum)	Struktur Budaya (Legitimasi Simbolik)	Struktur Sosial (Stratifikasi, akumulasi kehormatan dan)
Durkheim	Struktur Budaya (sentiment kolektif, nilai-nilai social)	Struktur Sosial (diferensiasi social dan insentif)	Struktur Teknik (kepemimpinan)

C. Gerakan Sosial

Robert & Kloss (1979:14) mengungkapkan bahwa Antony Giddens dalam mendefinisikan gerakan sosial sebagai sekelompok orang yang terlibat dalam mencari penyelesaian atau untuk menghambat suatu proses perubahan sosial. Normalnya gerakan sosial ada dalam hubungan konflik dengan organisasi yang tujuan dan pandangan sering bertentangan.²⁷

Gerakan sosial selalu mengalami sebuah perkembangan, mahasiswa yang selalu dikatakan sebagai *agen of change* serta penggerak dalam perubahan bangsa tidak pernah lepas dari sebuah aksi-aski sosial. Hal yang masih sangat terlintas dalam pikiran apabila membicarakan mengenai gerakan

²⁶ Ibid.

²⁷ Putri, Dibyareswari Utami. 2012. Peran Media Baru Dalam Membentuk Gerakan Sosial (Studi Kasus pada Individu Yang Terlibat dalam Indonesia Unite Di Twitter. Skripsi s1. Universitas Indonesia.

sosial mahasiswa pastilah teringat gerakan pada era orde baru. Dimana mahasiswa disitu berusaha menjatuhkan rezim Soeharto dan melantangkan korupsi sebagai salah satu sumber dari ketertindasan rakyat.²⁸

Gerakan sosial biasanya muncul tidak lama situasi keresahan sosial tercipta. Setelah mengalami tahap penurunan kegiatan, kadang kala gerakan-gerakan sosial itu sempat menciptakan organisasi permanen atau hilang begitu saja tanpa bekas yang berarti.²⁹

Terdapat tiga konsep kunci dalam teori gerakan sosial yang biasanya memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan aksi-aksi kolektif. Ketiga konsep itu meliputi :

- 1) Struktur Kesempatan Politik (*Political Opportunity Structure*),
- 2) Struktur Mobilisasi (*Mobilizing Structures*), dan
- 3) Pembingkai Aksi (*Framing*).³⁰

Hal tersebut lantas memunculkan berbagai pertanyaan bagi peneliti mengenai transformasi gerakan sosial yang dahulunya terfokus pada ruang fisik lalu dalam 10 tahun terakhir ini muncul gerakan-gerakan sosial yang diawali dari media sosial. Atas dasar ini, peneliti mengambil tema untuk tulisan ini mengenai “*New Media* Dan Tranformasi Gerakan Sosial Terhadap Kebijakan Pemerintah Aceh Di Era Pandemi Covid-19”. Hal ini bertujuan untuk mengetahui peran media terhadap transformasi gerakan sosial. Ruang

²⁸ Ardianto, Soleh Soemirat. 2002. Dasar-Dasar Public Relations. Cetakan pertama. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

²⁹ Kamarudin, S.A. 2012. Pemberontakan Petani UNRA 1943 (Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Sulawesi Selatan Pada Masa

³⁰ Noorhaidi Hasan. *Islam Politik, Teori Gerakan Sosial, dan Pencarian Model Pengkajian Islam Baru Lintas-Disiplin*. Jurnal Al-Jami'ah, Vol. 44, No. 1. 2006.

publik digital memang selalu menawarkan opini-opini publik yang mudah diakses dengan biaya yang terbilang murah karena hanya bermodal dengan laptop ataupun smartphone yang telah diisi dengan pulsa internet. Hal ini lah yang kemudian memunculkan ketertarikan ruang digital untuk membangun opini publik dan mendorong terjadinya transformasi gerakan sosial di ruang digital.³¹

Studi tentang gerakan sosial dapat dibagi menjadi dua pendekatan yang saling bertentangan.³² Pendekatan pertama adalah teori yang cenderung melihat gerakan sosial sebagai suatu “masalah” atau disebut sebagai gejala penyakit masalah kemasyarakatan. Teori ini berakar dan dipengaruhi oleh teori sosiologi dominan, yaitu Fungsionalisme atau sering disebut sebagai Fungsionalisme Struktural. Fungsionalisme melihat masyarakat dan pranata sosial sebagai sistem dimana seluruh bagiannya saling tergantung satu sama lain dan bekerja bersama guna menciptakan keseimbangan. Dalam hal ini “keseimbangan” merupakan unsur kunci utama dengan menekankan pentingnya kesatuan masyarakat dan sesuatu yang dimiliki bersama oleh anggotanya. Oleh sebab itu, gerakan sosial dianggap sebagai sesuatu yang “negatif” karena akan dapat menimbulkan konflik yang dapat mengganggu keharmonisan dalam masyarakat.

Pendekatan kedua adalah teori-teori ilmu sosial yang justru melihat gerakan sosial sebagai “fenomena positif”, atau sebagai sarana konstruktif

³¹ Astuti, S.A. 2013. Media Sosial Sebagai Ruang Publik Antara Netiket dan Netizen. Kanal. 1(2): 1-220.

³² Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, 1966, hal. 35

bagi perubahan sosial. Pendekatan ini merupakan alternatif terhadap fungsionalisme, dan dikenal dengan “teori konflik”. Teori konflik pada dasarnya menggunakan tiga asumsi dasar, yaitu:

- Rakyat dianggap sebagai sejumlah kepentingan dasar dimana mereka akan berusaha secara keras untuk memenuhinya.
- Kekuasaan adalah inti dari struktur sosial dan hal ini

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pembelajaran dan bahan perbandingan, maka peneliti menggunakan acuan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang telah dilakukan.

Pertama, Arum Nur Hasanah dengan judul “*Transformasi Gerakan Sosial Di Ruang Digital*”. Dalam penelitian tersebut peneliti mempertanyakan bagaimana peran media sosial sebagai sarana gerakan sosial pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi transformasi gerakan sosial yang ditemui di lapangan. Transformasi gerakan sosial ini bisa dilihat pada isu-isu atau suatu gerakan sosial yang dahulunya dilakukan pada ruang publik kini dilakukan di ruang digital dimana media sosial sebagai sarana dalam gerakan sosial mahasiswa.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa media sosial sangat berperan penting dalam gerakan sosial mahasiswa di FISIPOL UGM. Adapun peran media sosial dalam gerakan sosial mahasiswa untuk

memobilisasi suatu massa yang ada, media sosial bisa berperan untuk memberikan suatu isu yang membangkitkan kemarahan netizen dalam suatu gerakan sosial, media sosial berperan dalam memanaskan suatu isu yang ada di masyarakat, media sosial berperan membangun opini publik, media sosial berperan untuk membentuk identitas serta mencari solusi bersama.³³ Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa fokus penelitian serta objek yang akan menjadi kajian adalah terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Aceh, yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat berbedanya dengan yang dilakukan penelitian di atas terhadap mahasiswa.

Kedua, penelitian oleh Dewi Kartika Sari & Royke R. Siahainenia dengan judul "*Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah*" peneliti ingin menganalisis seberapa jauh gerakan sosial baru memasuki ruang publik virtual khususnya pada kasus Satinah, Satinah, yang bernama lengkap Satinah binti Jumadi adalah seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Dusun Mrunten, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Semarang. Satinah berangkat ke Arab Saudi menjadi TKI setelah pada bulan September 2006 mendaftar melalui Perusahaan PT Djamin Harapan Abadi. Tujuan ibu anak satu ini untuk mengadu nasib ke negeri orang adalah untuk menghidupi anaknya. Di sana Satinah mengalami nasib buruk yaitu penganiayaan oleh majikan dan sampai akhirnya terjadi insiden pada 18 September 2007 Satinah membela diri karena perlakuan buruk oleh majikannya dan memukul balik sampai majikannya harus di larikan ke

³³ Arum N. Hasanah. "*Transformasi Gerakan Sosial Di Ruang Digital*". Jurnal Pendidikan Sosiologi. Vol 6. No 6 Tahun 2017. Diakses dari <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/view/9126>. Pada tanggal 1 Juli 2020

Rumah sakit, singkatnya satinah menyerahkan diri ke polisi. Saat itu pula bermuculan sebuah gerakan bernama #SaveSatinah, Di media sosial, tanda pagar #SaveSatinah terus berkibar. Dukungan kepada Satinah banyak mengalir dan mendesak pemerintah untuk segera turun tangan. Berdasarkan hal itu hasil kajian menunjukkan bahwa ruang virtual telah mampu menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk mempertahankan diri serta melakukan perlawanan melalui aktivitas kolektif warga yang digerakkan oleh aktor-aktor tertentu.³⁴ Yang menjadi perbededaan dengan penelitian ini adalah studi kasus yang berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda, juga jika penelitian diatas ingin melihat kasus Satinah. Di penelitian ini yang ingin di lihat adalah bagaimana media mempengaruhi tranformasi gerakan sosial.

Ketiga, penelitian oleh Ramma Wisnu Dewantara dan Derajad S. Widhyharto dengan judul “*Aktivisme dan Kesukarelawanan dalam Media Sosial Komunitas Kaum Muda Yogyakarta*.” kemudian hasil penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwasanya kaum muda yang terhimpun di dalam komunitas telah berhasil dalam menciptakan sosial untuk menyebarkan isu dan informasi mengenai aktivitas mereka. Isu tersebut berhasil menarik pengguna media sosial lainnya dalam bentuk dukungan dan bergabungnya kaum muda ke dalam komunitas. Sebagai contoh, publikasi kegiatan dan rekrutmen menggunakan media sosial tidak hanya dilakukan oleh GMM, tetapi juga oleh beberapa komunitas kaum muda lain di

³⁴ Dewi Kartika Sari, Royke R. Siahainenia. “*Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah*” Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol 12, Nomor 1, Juni 2015: 105-118. Di akses dari https://www.researchgate.net/publication/328737648_Gerakan_Sosial_Baru_di_Ruang_Publik_Virtual_pada_Kasus_Satinah pada tanggal 1 Juli 2020

Yogyakarta yang mengusung isu berbeda dengan GMM. Gerakan sosial baru digerakan oleh kaum muda dengan menggunakan media sosial sebagai kekuatan baru, mengingat kaum muda menjadi segmen terbesar pengguna media sosial: kaum muda juga umumnya lebih peka terhadap berbagai isu yang ada di masyarakat. Dengan media sosial kaum muda dapat dengan mudah menyebarkan isu dan informasi, bahkan mencari dukungan publik untuk gerakan mereka.

Banyaknya kaum muda yang bergabung dalam gerakan sosial tidak terlepas dari media sosial sebagai media publikasi mereka. Penggunaan media sosial dalam membentuk gerakan sosial sangat efektif dalam menarik perhatian publik. Ruang publik dalam media sosial telah menjelma menjadi kekuatan publik, di mana segala isu dengan mudah tersebar di dalam media sosial sehingga dapat dijadikan ruang untuk menarik aspirasi masyarakat. Terbukti, telah banyak gerakan sosial yang berawal dari gerakan media sosial. Selain itu, gerakan media sosial juga dapat mengontrol perilaku masyarakat.

Aktivisme kaum muda di media sosial menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah, disaat pemerintah tidak dapat menjangkau isu yang ada di masyarakat dengan media sosial gerakan kaum muda mengangkat isu itu ke publik, sehingga menjadi isu yang mendapatkan perhatian publik, gerakan kaum muda ini juga menjadi pengganti peran pemerintah disaat pemerintah lambat dan tidak dapat menjangkau masyarakat kedalam lingkup terkecil di sinilah peran gerakan kaum muda mengisi kekosongan peran yang

ditinggalkan pemerintah.³⁵

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Retno Hapsari dengan judul “*Peran Media Baru Dalam Perkembangan Gerakan Social*” peneliti ingin melihat bagaimana efektifitas penggunaan media baru dalam setiap gerakan social baru. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah media baru dapat menjadi alat pendorong sebuah perubahan, termasuk dapat berperan dalam mendorong perkembangan gerakan social. Hal itu dikarenakan sifat interaktivitas dari media baru yang memungkinkan setiap orang bertukar informasi tanpa terbatas. Factor yang mempengaruhi keberhasilan gerakan social adalah dengan menggunakan media baru dan pesan yang menarik serta mudah dipahami, kemudian keberhasilan media baru dalam gerakan social harus mencakup gerakan online dan offline. Maksudnya tetap saja bentuk aksi nyata dan pada akhirnya sebuah gerakan si dunia maya yang dimediasi oleh media baru tidak akan membawa dampak apapun tanpa adanya realisasi di dunia nyata.³⁶ Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak di studi kasus yang berbeda meskipun yang ingin dilihat adalah hal yang sama. Namun, penelitian ini lebih kritis terhadap kebijakan Pemerintah Aceh di era pandemi serta wujud dari tranformasi gerakan sosial.

³⁵ Ramma Wisnu Dewantara, Derajad S. Widhyharto, *Aktivisme dan Kesukarelawanan dalam Media Sosial Komunitas Kaum Muda Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 19, Nomor 1, Juli 2015. diakses pada tanggal 4 Juli 2020 dari situs <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10855>

³⁶ Dwi R. Hapsari. “*Peran Media Baru Dalam Perkembangan Gerakan Social*”. *Demokrasi Dalam Ruang Virtual*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2011. Di akses dari <https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/81832/Peran%20Media%20Baru%20dalam%20perkembangan%20gerakan%20sosial.pdf;jsessionid=49233EF0443BFA21BC53B873F2BA B932?sequence=1> pada tanggal 4 juli 2020

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif, Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁷

Adapun dalam memperoleh data peneliti menggunakan metode Kualitatif bersifat Deskriptif yang merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.³⁸ Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul dan hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dilaksanakan penelitian ini adalah Banda Aceh. Dikarenakan objek penulisan penelitian ini mempunyai masalah yang berkenaan dengan daerah tersebut yang merupakan tempat tujuan penulis untuk melakukan penelitian

³⁷ Moleong, Lexy, 2002. *“Metode Penelitian Kuantitatif”*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 29.

³⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, 2007. *“Metode Penelitian Pendidikan”*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 60

tentang *New Media* dan Tranformasi Gerakan Sosial Terhadap Kebijakan Pemerintah Aceh di Era Pandemi Covid-19.

3.3 Sumber Data

Penelitian kualitatif mempunyai sumber data utama dari kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³⁹ Penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari percobaan atau kegiatan lapangan yang dilakukan. Data ini merupakan data asli atau original dan baru pertama kali diperoleh dari informan secara langsung dilokasi penelitian.⁴⁰

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur dan sumber-sumber tertulis yang diambil langsung dari objek penelitian.⁴¹

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan mempunyai dua teknik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁹ Moleong Lexy, 2007. "*Metode Penelitian Kualitatif*", Bandung: Remaja Rosda Karya.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan*, (Yogyakarta: Andi, 2017), hal . 69.

1. Observasi

Metode observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sengaja, sistematis ke lokasi penelitian untuk dapat melihat objek yang akan diteliti dan memperoleh data yang lebih akurat yang dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan alat indera yang dalam hal ini lebih difokuskan pada mata.⁴²

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

Dengan demikian observasi digunakan untuk mengamati secara langsung tentang kondisi objek penelitian atau peristiwa yang sedang terjadi saat itu. Dan peneliti sekaligus harus mencatat dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan saat dilapangan. Melalui metode observasi tersebut peneliti akan mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai *New Media* dan Tranformasi Gerakan Social Terhadap Kebijakan Pemerintah Aceh di Era Pandemic Covid-19.

⁴² Moh Natzir, 1998. "*Metode Penelitian*", Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 212.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melakukan percakapan atau tanya jawab.⁴³ Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.⁴⁴

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti.⁴⁵ Peneliti akan menanyakan langsung beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu kepada Lembaga Swadaya Masyarakat, Aktivis, Pegiat media sosial, Pakar di bidang social, Dinas Kesehatan serta pihak Pemerintah Aceh.

3. Analisis Isi (*content analysis*)

Analisis isi atau *content analysis* merupakan metode penelitian yang membahas secara mendalam isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media. Analisa isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis isi untuk menganalisa informasi pada media sosial yaitu *facebook* dan *instagram*.

⁴³ Djam'ah Satori, 2011. "*Metodelogi Penelitian Kualitatif*", Bandung: Alfabeta, hal, 130.

⁴⁴ Sugiyono, 2011. "*Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif*", Bandung: Alfabeta, hal, 172.

⁴⁵ Moleong, J Lexy. 2004. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Bandung: Remaja Rosdakarya.

3.5 Informan

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian merupakan sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti.⁴⁶

Penentuan informan dilakukan menggunakan cara *purposive sampling*. Dari keseluruhan populasi dipilih beberapa sampel dari responden dan informan yang dapat mewakili yang dianggap mampu dan ahli dalam menjawab permasalahan.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu :

No	Informan	Jumlah Informan	Urgensi
1	LSM MaTA (Bidang Advokasi Kebijakan Publik)	1	Sebagai orang yang menjadi orang berpengaruh dalam melakukan pergerakan social.
2	Pegiat Media Sosial/ Media <i>Online</i>	2	Sebagai orang yang ahli dalam melihat situasi serta kondisi penggunaan komunikasi baik dunia maya.
3	Aktivis GERAM (Gerakan Aceh Menggugat)	1	Sebagai orang yang menjadi orang terdepan dalam melakukan pergerakan social.
4	Dinas Kesehatan (Bidang Kesehatan Masyarakat)	1	Sebagai Lembaga yang mengetahui kesehatan masyarakat
5	Pihak Pemerintahan Aceh	1	Sebagai pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan public
6	Pakar Di bidang Sosial <i>Movement</i>	1	Sebagai pengamat perubahan struktur sosial atau fenomena yang terjadi di masyarakat
Jumlah		7 orang	

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, 1998. "*Prosedur Penelitian*", Jakarta: Rineka Cipta, hal. 236.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data berarti mengolah data, menganalisa data, serta memecahkan masalah-masalah kedalam unit-unit yang lebih kecil, atau mencari pola dan tema-tema yang sama. Proses awalnya merupakan mengelompokkan data yang telah terkumpul. Kemudian barulah dilakukan analisis data setelah data primer dan sekunder terkumpul dan di olah serta dijelaskan lebih deatail dalam pembahasan.

Menurut Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yaitu:⁴⁷

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴⁸

⁴⁷ Sugiyono. 2007. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, Bandung: Alfabeta, hal. 244.

⁴⁸ *Ibid.* hal. 247

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴⁹

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Mulai dari permulaan pengumpulan data, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsisi.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.* hal 249

⁵⁰ *Ibid.* hal 252

BAB IV

PEMBAHASAN

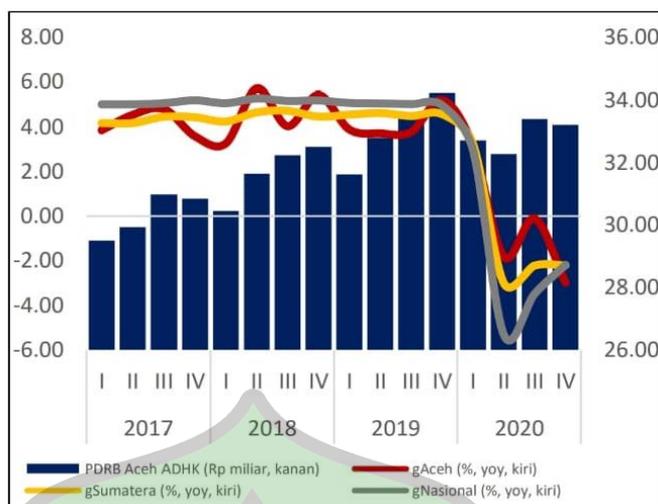
4.1 Profil Provinsi Aceh: Kondisi Sosial dan Ekonomi

Provinsi Aceh merupakan Provinsi yang terletak di ujung paling barat pulau Sumatera. Provinsi Aceh memiliki posisi strategis karena menjadi pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan. Keberagaman budaya yang dimiliki masyarakat Aceh mempengaruhi kondisi sosial di lingkungan.¹⁰¹

Kondisi Perekonomian di Provinsi Aceh

Kondisi ekonomi Provinsi Aceh tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 166,38 triliun. Sementara itu PDRB tanpa migas adalah sebesar Rp161,30 triliun. Namun, jika dilihat secara andil kapasitas perekonomian dari PDRB ADHK, Aceh tercatat memiliki pangsa sebesar 5,7% terhadap perekonomian Sumatera. Sumbangan tersebut relatif tidak mengalami banyak perubahan dibanding periode-periode sebelumnya. Dengan proporsi tersebut, Aceh masih menjadi Provinsi dengan perekonomian ketiga terkecil di Sumatera setelah Bengkulu (2,0%) dan Kepulauan Bangka Belitung (2,3%). Sementara itu, Sumatera Utara (23,1%), Riau (21,6%), dan Sumatera Selatan (13,5%) masih menjadi provinsi dengan sumbangan ekonomi paling dominan di Sumatera dengan pangsa dari ketiga Provinsi tersebut hampir mencapai 60% dari total ekonomi Sumatera.

¹⁰¹ Profil Provinsi Aceh diakses melalui <https://ppid2.acehprov.go.id/v2/pages/pd> (diakses pada 16 Juli 2021)



Gambar. 1 Grafik Kondisi Ekonomi Provinsi Aceh tahun 2017-2020

Berdasarkan grafik di atas, kondisi ekonomi Provinsi Aceh berbanding terbalik dengan membaiknya perekonomian Nasional dan Sumatera, perekonomian Aceh pada triwulan laporan mengalami penurunan. Ekonomi Aceh tercatat mengalami kontraksi sebesar -2,99% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya yang terkontraksi sebesar -0,11% (yoy). Pada tahun 2020, ekonomi Aceh tercatat mengalami kontraksi sebesar -0,37% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan tahun 2019 yang sebesar 4,14% (yoy). Ditinjau dari sisi permintaan, menurunnya perekonomian Aceh pada triwulan laporan utamanya disebabkan oleh menurunnya konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Sementara itu dari sisi lapangan usaha, LU pertanian, kehutanan, dan perikanan, LU konstruksi, serta LU industri pengolahan menjadi penyebab utama penurunan perekonomian Aceh.¹⁰²

¹⁰² Bank Indonesia (2021) Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Februari 2021

Kondisi Pendidikan di Provinsi Aceh

Kondisi pendidikan di Provinsi Aceh berdasarkan katalog statistik pendidikan yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Aceh menyatakan bahwa:

- Partisipasi PAUD di Provinsi Aceh mencapai 29,08 %, artinya masih banyak anak usia 3-6 tahun belum diperkenalkan pada pendidikan.
- Program wajib belajar 9 tahun di Provinsi Aceh sudah tercapai, dimana nilai APS kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,75 % sudah di atas target (95 persen).
- Bila dilihat dari angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas, nampak masih terdapat 1,79 persen penduduk yang masih buta huruf.
- Ditinjau dari ijazah tertinggi yang dimiliki, lebih dari separuh penduduk Aceh berpendidikan SLTP ke atas.
- Dilihat dari sudut pandang gender, hampir sudah tidak ada lagi terjadi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal pendidikan.¹⁰³

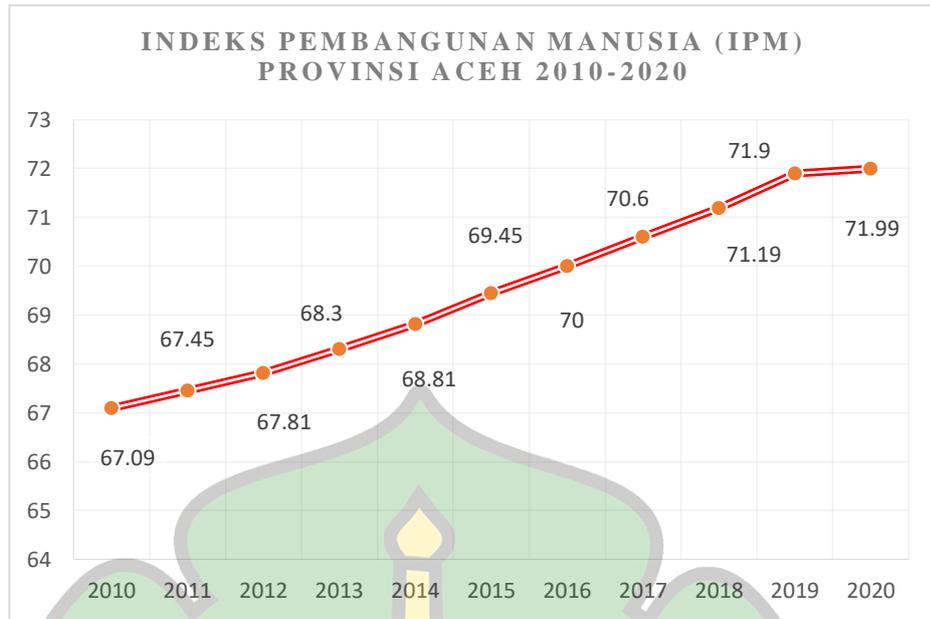
Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh

Pembangunan Manusia didefinisikan sebagai proses perluasan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standar of living*).¹⁰⁴

Berikut ini merupakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh periode tahun 2010 hingga 2020 :

¹⁰³ BPS Aceh (2019) Statistik Pendidikan Provinsi Aceh Katalog BPS: 4302002.11

¹⁰⁴ BPS Provinsi Aceh (2021) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh Tahun 2020 No. 04/01/11/XXIV, 4 Januari 2021



Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh, 2014–2020

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan secara umum pembangunan manusia di Provinsi Aceh terus mengalami kemajuan dan peningkatan pada periode 2010 hingga 2020. IPM Provinsi Aceh meningkat dari 67,09 pada tahun 2010 menjadi 71,99 pada 2020. Selama periode tersebut, IPM Provinsi Aceh rata-rata tumbuh 0,71 % per tahun. Pada periode 2010-2020 IPM provinsi Aceh tumbuh sebesar 0,13 %. Pertumbuhan pada periode tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan 2018-2019 yang tumbuh sebesar 1 %. Hal tersebut terjadi akibat adanya covid 19 yang menyebabkan turunnya pendapatan per kapita masyarakat.

Indeks Demokrasi di Provinsi Aceh

Indeks demokrasi adalah sebuah indeks untuk mengukur keadaan demokrasi suatu negara. Berikut merupakan indeks demokrasi di Provinsi Aceh

pada tahun 2015 sampai tahun 2018 yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan:¹⁰⁵

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	67,78	72,48	70,93	79,97	78,00

Indeks Demokrasi Provinsi Aceh tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Aceh di tahun 2015 yaitu 67,78 dalam skala indeks 0 sampai 100. Kemudian naik menjadi 72,48 di tahun 2016 dan kembali turun di tahun 2017 menjadi 70,79. Sedangkan di tahun 2018 kembali naik ke titik tertinggi menjadi 79.97, walaupun terakhir di tahun 2019 kembali turun menjadi 78,00 tingkat demokrasi Provinsi Aceh tersebut masih termasuk dalam kategori “sedang”.¹⁰⁶

Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Aceh

Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Pemerintah Aceh melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh telah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikan upaya Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Aceh dan Kabupaten Kota. Upaya-upaya tersebut merupakan indeks untuk mengukur Keterbukaan Informasi Publik di Aceh.

Indeks ini menjadi indikator dalam mengukur implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Aceh. Indeks ini memotret tiga hal utama yaitu dari sudut lingkungan hukum, politik dan ekonomi. Dari kehadiran indeks ini ditujukan

¹⁰⁵ BPS Provinsi Aceh (2020) Berita Resmi Statistik Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh 2019 No. 34/08/11/Th.XXIII, 3 Agustus 2020

¹⁰⁶ BPS Aceh (2019) Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh No. 34/08/11/Th.XXIII, 3 Agustus 2020

untuk mewujudkan good governance, pelayanan publik yang berkualitas, dan pencegahan potensi terjadinya korupsi.

Indeks Anti Korupsi di Provinsi Aceh

Indeks anti korupsi ini menggambarkan tingkat persepsi para pengguna data tentang kasus korupsi yang terjadi. Berikut merupakan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) terhadap Pelayanan BPS Menurut Wilayah PST Tahun 2020: ¹⁰⁷

Wilayah PST	IPAK
BPS Provinsi Aceh	90.02
Simelue	86.75
Aceh Singkil	86.15
Aceh Selatan	88.34
Aceh Tenggara	93.95
Aceh Timur	86.83
Aceh Tengah	97.17
Aceh Barat	98.87
Aceh Besar	86.42
Pidie	89.68
Bireuen	95.57
Aceh Utara	84.34
Aceh Barat Daya	81.64
Gayo Lues	95.09
Aceh Tamiang	95.40
Nagan Raya	92.49
Aceh Jaya	91.57
Bener Meriah	92.59
Pidie Jaya	85.64
Banda	93.39
Sabang	89.55
Langsa	95.40
Lhokseumawe	96.59
Subulussalam	92.09

Sumber: hasil olah Survei kebutuhan data (SKD) tahun 2020, BPS RI

Berdasarkan tabel di atas, wilayah dengan IPAK tertinggi adalah Kabupaten Aceh Barat dengan IPAK sebesar 98.87 yang menjadikan PST BPS Kabupaten Aceh Barat sebagai PST dengan IPAK tertinggi di Aceh. Disusul oleh Kabupaten

¹⁰⁷ BPS Provinsi Aceh (2021) “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data Provinsi Aceh 2020”, Katalog: 1399013.11

Aceh Tengah dan Kabupaten Bireun dengan IPAK sebesar 97,17 dan 95,57. Sedangkan untuk wilayah dengan IPAK terendah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu sebesar 81,64 persen.

Berdasarkan paparan yang telah dirumuskan penulis menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi Provinsi Aceh mengalami penurunan yang disebabkan karena menurunnya konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Kondisi pendidikan di Provinsi Aceh belum seluruhnya merata dimana pada anak dibawah usia 6 tahun masih banyak yang belum di perkenalkan dengan pendidikan. Lalu, masih ada penduduk yang buta huruf. Namun, separuh penduduk Aceh berpendidikan SLTP ke atas dan hampir sudah tidak ada lagi terjadi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal pendidikan. Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh terus mengalami kemajuan dan peningkatan pada periode 2010 hingga 2020. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Aceh termasuk dalam kategori “sedang” dimana setiap tahunnya dapat mengalami kenaikan atau penurunan. Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Aceh memotret tiga hal utama yaitu dari sudut lingkungan hukum, politik dan ekonomi. Sementara itu, wilayah dengan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tertinggi di Provinsi Aceh adalah Kabupaten Aceh Barat dan wilayah dengan IPAK terendah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Jumlah Pengguna Internet Provinsi Aceh

Pengguna internet adalah setiap penduduk yang tersambung dengan internet baik menggunakan sambungan internet lewat perangkat Mobile (*Smartphone*), Laptop maupun Personal Computer (PC). Saat ini, peran internet semakin penting dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik di dunia global. Berdasarkan laporan

International Teecomunication Union (ITU) yang merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) jumlah pengguna internet dunia 2018 sebesar 3,9 miliar melebihi setengah populasi dunia.

Kenaikan jumlah itu juga dialami di Indonesia, hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2020, jumlah pengguna internet di indonesia sebesar 196.714.070,3 juta . Kemudian, kontribusi pengguna internet per wilayah dari seluruh pengguna internet di daerah Sumatera dengan total penetrasi 21.6 %. Selanjutnya persentase pengguna internet di Provinsi Aceh melalui hasil survei APJII tahun 2019-2020 terhadap populasi penduduk diwilayah Aceh mengalami kenaikan dari 1.5 persen tahun 2019 menjadi 1.9 persen di tahun 2020, dengan jumlah pengguna internet di Provinsi Aceh tahun 2018 sebesar 2,621,700 juta meningkat menjadi 3,721,410 juta di tahun 2019-2020.¹⁰⁸

4.2 Transformasi Pergerakan *civil society* di Era pandemi Covid-19

Pada saat ini, wujud transformasi gerakan sosial yang menggunakan media baru juga tetap harus berkolaborasi dengan media massa mainstream dukungan dari media mainstream baik dalam hal pemberitaan maupun di luar pemberitaan sangat diperlukan dalam sebuah gerakan sosial yang menggunakan media baru agar pesan tersebar luas, media baru yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan media sosial.

Berdasarkan hasil wawancara, Hafidh menyatakan bahwa :

“Gerakan sosial ada banyak perubahan bukan karena soal pandemi saja tapi saya sendiri melihat bahwa perubahan metode atau alat yang dipakai untuk

¹⁰⁸ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), (2020). *“Laporan Survei Internet APJII 2019-2020 (Q2)”*. Indonesia Survey Center.

*melakukan advokasi oleh gerakan-gerakan sosial. Dulu orang lebih konvensional lebih banyak menggunakan cara-cara konvensional, melakukan aksi, dan lain-lain”.*¹⁰⁹

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dapat diartikan sekarang gerakan sosial masyarakat berubah metode atau cara yang digunakan. Metode yang sekarang digunakan masyarakat untuk kepentingan sosial itu lebih mengarah ke media sosial seperti facebook dan instagram.

Kemunduran media cetak dan kemajuan media digital menjadi sarana bagi gerakan sosial di ruang digital dimana masyarakat dapat beropini dan menyuarakan pendapatnya melalui media sosial yang meringkas dunia menjadi kampung global. Hal ini bukan tanpa sebuah alasan, media sosial menawarkan bagi penggunaanya untuk menceritakan apapun dalam kehidupannya, sehingga setiap orang yang menggunakan media sosial mempunyai kesempatan yang sama untuk beropini yang dapat berakibat pada suatu gerakan sosial tertentu.¹¹⁰

Media sosial kini lebih banyak digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal inilah yang kemudian memunculkan ketertarikan ruang digital untuk membangun opini publik dan mendorong terjadinya transformasi gerakan sosial di ruang digital. Ruang digital memang tidak selamanya menciptakan wacana terselubung, namun dapat menjadi suatu alternatif saat ruang publik fisik tidak memungkinkan dilakukan karena telah dikontrol atau dibatasi oleh otoritas tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara, Sultan Al-Farabi menyatakan bahwa:

“Penggunaan sosial media pada saat ini memang sangat dibutuhkan dikarenakan tengah kondisi pandemi covid-19 yang dimana Polri ataupun Polisi Republik

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Hafidh (Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik) pada Tanggal 22 Januari 2021

¹¹⁰ Arum Nur Hasanah (2017) *“Transformasi Gerakan Sosial Di Ruang Digital”* Jurnal E-Societas, Jurnal Pendidikan Sosiologi Vol 6, No 6 (2017)

*Indonesia mengeluarkan himbauan untuk tidak aksi, dan itu memang wajib ditaati oleh seluruh kepolisian di seluruh wilayah dan termasuk di Aceh. Oleh sebab itu ditengah berbagai permasalahan dan juga polemik tentunya ada saja alasan yang tidak boleh aksi”.*¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara, Zulkarnaini menyatakan bahwa:

*“Sosial Medial cukup meningkat drastis, karena pandemi juga sedang melanda, dan juga masyarakat sekrang mulai aktif menggunakan media sosial pada umumnya. Kemudian komunikasi dijadikan sebagai sarana gerakan sosial di era pandemi”.*¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa melalui sosial media atau dunia maya wajar saja dilakukan. Karena jalan alternatif untuk memudahkan pikiran dan tujuan dari gerakan sosial masyarakat dapat tersampaikan melalui sosial media. Media memang dijadikan sarana sekarang untuk melakukan berbagai hal, seperti untuk pendidikan, bahkan perekonomian, apalagi gerakan sosial yang dilakukan secara aktif melalui media. Itu adalah hal yang sebenarnya sudah dilakukan sebelum pandemi, hanya saja sekarang saat pandemi sepertinya gerakan kritik-kritik melalui media masa itu lebih gencar dan lebih terlihat karena tidak adanya ruang publik yang terlihat.

Kronologis transformasi dari gerakan konvensional ke digital di Aceh

Gerakan sosial mengalami transformasi pada era 2000-an dimana sebelum era tersebut diskusi masih pada ruang-ruang fisik dan kebebasan masih dibatasi sehingga dalam melakukan sebuah gerakan yang ada di masyarakat masih

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Sulthan Al-Farabi (Pegiat *New Media*) pada Tanggal 20 Januari 2021

¹¹² Hasil wawancara dengan bapak Zulkarnaini (Pegiat *Media*) pada Tanggal 16 Januari 2021

sedikit tertutup. Setelah terjadi reformasi maka terjadi suatu kebebasan dalam demokrasi yang ada di masyarakat.¹¹³

Adanya postingan dari beberapa tokoh masyarakat tidak jarang menuai respon yang banyak baik itu *like*, *share*, ataupun komentar yang pro dan kontra. Dengan memulai postingan tersebut sudah memicu suatu gerakan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Terkadang mereka melakukan diskusi di media sosial mengenai kasus-kasus yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat, yang menuai pro serta kontra dari masyarakat.¹¹⁴

Pada saat ini dapat kita melihat situasi dan kondisi dunia yang dilanda Covid-19 memberikan efek disetiap bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Gerakan sosial dalam masyarakat memiliki perubahan pada masa pandemi. Masyarakat yang awalnya melakukan gerakan sosial secara langsung terhadap kebijakan pemerintah kini mulai berbeda dan terbatas. Teknologi yang semakin canggih dan banyak digunakan oleh masyarakat baik muda sampai tua sudah menggunakan dan lancar dengan melihat cara/tutorial langsung di media sosial. Dengan demikian masyarakat mencari jalan alternatif untuk tetap berpendapat yaitu dengan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melakukan aksi-aksi gerakan sosial. Keberhasilan gerakan sosial dengan menggunakan media sosial adalah dilihat dari kalimat yang mudah dipahami dan jelas maksud dan tujuan dari gerakan sosial tersebut. Menggunakan media sosial untuk aksi harus berbentuk aksi sosial nyata yang disampaikan dengan jalan mempublish di media sosial atau dunia maya.

¹¹³ Arum Nur Hasanah (2017) “*Transformasi Gerakan Sosial Di Ruang Digital*” Jurnal E-Societas, Jurnal Pendidikan Sosiologi Vol 6, No 6 (2017)

¹¹⁴ *Ibid* hal.10

Berdasarkan hasil wawancara Reza Idria yaitu pakar sosial menyatakan bahwa:

“Transformasi gerakan sosial selama Covid nampak sekali ada perubahan yang signifikan dimana begitu banyak orang bisa menggunakan platform sosial media jadi kalau dulu orang membuat kampanye ataupun pertemuan berkumpul sekarang bisa menggunakan facebook dan banyak koneksi-koneksi yang bisa digunakan”.¹¹⁵

Banyak informasi yang didapat oleh masyarakat dari sosial media dan banyak pula informasi yang disebar luaskan melalui sosial media. Hal ini bertujuan untuk membagikan informasi lewat jejaring sosial lainnya. Gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat kini memang banyak perubahan, dengan adanya sosial media dapat membantu memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi.¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara, Thamren Ananda menyatakan bahwa:

“Terjadi perubahan metodologi, kalau dulu metodologi gerakan sosial bisa langsung observasi ke lapangan untuk melihat realitas lalu melakukan respon terhadap realitas, tetapi dengan pembatasan-pembatasan sosial selama pandemic covid-19 ini maka gerakan sosial itu juga mengalami perubahan. Yaitu, kalau dulu orang membutuhkan online, sekarang orang berada dalam online lewat salah satu aplikasi, zoom, fb, wa, dan lain-lain. Berada di dalam online itu untuk melakukan komunikasi. Media menjadi alat sosialisasi misalnya, bagaimana kita kampanye tentang penggunaan masker/3m, kemudian bagaimana kita kampanye bahaya covid-19 dan bagaimana kita berkampanye orang tetap dirumah, kecuali udah penting atau orang boleh keluar tapi juga jaga jarak, pakai masker, dll”.¹¹⁷

Kebijakan dan kritik di era pandemi

Kebijakan Pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian secara universal baik itu dilakukan

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan bapak Reza Idria (pakar sosial) pada Tanggal 24 Januari 2021

¹¹⁶ Azman (2018) “Penggunaan Media Massa dan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Komunikasi”. Jurnal Peurawi Vol. 1 No. 1 Tahun 2018

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan bapak Thamren Ananda (penasehat Gubernur) pada Tanggal 22 Januari 2021

secara langsung maupun dilakukan tidak secara langsung, kebijakan dapat dilihat dan dinilai dari berbagai dimensi kehidupan publik. Kemudian kritik merupakan proses analisis serta evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, merespon balik akan sesuatu baik atau buruk terhadap keputusan kebijakan.

Di era pandemi, Pemerintah Aceh telah memberlakukan beberapa kebijakan publik yang bersifat dan berguna untuk menghentikan virus covid 19. Hal ini sesuai keputusan Presiden No.9 Tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Presiden No.7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Maklumat kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: MAK/2/III/2020 tentang keputusan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona (covid-19) dan keputusan Gubernur Aceh Nomor 360/969/2020 tentang penetapan status tanggap darurat skala provinsi untuk penanganan Corona Virus Disease 2019.¹¹⁸

Untuk mengatasi meluasnya penyebaran covid-19 di Aceh yang ditandai dengan meningkatnya jumlah warga Aceh dalam status orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), positif covid-19 dan meninggal dunia karena covid-19. Kemudian Pemerintah Aceh memberlakukan beberapa kebijakan untuk mengatasi menyebarnya virus covid 19 yang beberapa kebijakan Pemerintah Aceh tersebut mendapat respon dari *civil society* (masyarakat) yang geram terhadap aturan yang diberlakukan. Masyarakat kemudian meluapkan ekspresinya melalui media sosial yang dianggap dapat mewakili kegelisahan atas suatu masalah yang ada pada kebijakan pemerintah.

¹¹⁸ Keputusan Presiden No.9 Tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Presiden No.7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)

Berikut beberapa respon masyarakat atas kebijakan Pemerintah Aceh dalam menangani pandemi:

- Kebijakan pemberlakuan jam malam

Pemerintah Aceh mengintruksikan kepada Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pengusaha dan masyarakat terhadap penerapan jam malam. menerapkan jam malam sejak tanggal 29 Maret 2020 (minggu malam) sampai dengan 29 Mei 2020 (jum'at malam).¹¹⁹ Pada bulan maret 2020, pemberlakuan jam malam yang diterapkan oleh Pemerintah Aceh tentunya memberikan berbagai respon dari masyarakat. Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dahlan Jamaluddin, menyatakan pemberlakuan jam malam sebagai penyikapan terhadap attitude masyarakat Aceh, berangkat dari berbagai saran tim medis dan realitas di lapangan.

"FORKOPIMDA memilih jam malam, karena banyak kegiatan di Aceh yang berlangsung pada malam hari, sejak dua malam ini kita lihat sudah sangat efektif, tapi tetap butuh tim polisi dan TNI untuk membubarkan kerumunan itu," (Dahlan Jamaluddin, Ketua DPRA)

Sementara itu, warga Aceh punya pendapat tersendiri mengenai pemberlakuan jam malam. Berikut beberapa tanggapan masyarakat mengenai pemberlakuan aturan jam malam oleh pemerintah Provinsi Aceh:

"Landasan hukumnya apa? Apa dengan pemberlakuan jam malam bisa membuktikan bahwa masyarakat Aceh akan terhindar dari virus corona, saat ini pemberlakuan jam malam hanya mengingatkan kita pada masa darurat militer saja, tidak ada solusi kecuali menimbulkan luka lama," (Rubaini Lisma, penderita penyakit asma).¹²⁰

¹¹⁹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020. Diakses melalui <https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/409744c5-70a2-4f42-bf3c-7cfd4f22085c> (diakses pada 16 Juli 2021).

¹²⁰ BBC News Indonesia 7 April 2020. "Jam malam, dilema pengendalian Covid-19 dan kebijakan 'terburu-buru yang luput mengukur dampak ekonomi". Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52183377> (pada tanggal 20 Juni 2020)

"Kondisi jalan sangat sepi seperti gak ada kehidupan, lampu-lampu dimatikan di jalan jadi was-was ketika pulang sebab rumah yang jauh, seharusnya lockdown dan subsidi kebutuhan masyarakat," (Fuji Safrida Beutari, karyawan shift malam).¹²¹

"Kami yang bekerja di sini ada 14 orang, biasanya laku sampai 80 kg sate sejak dibuka pukul 16.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB dini hari, tapi karena jam malam warung sudah tidak lagi buka" (Saiful Bahri, pegawai warung sate).¹²²

Kemudian akun facebook Syakya Meirizal juga merespon kebijakan Pemerintah Aceh terkait penetapan jam malam, berikut isi responnya:

"Aceh berhasil atasi corona karena JAM MALAM. Jika jam malam dicabut, maka jebol, pecah, tak terbendung dan meledak kasus covid 19 di Aceh. GONGGONG MEREKA ITU".(Syakya Meirizal, Inisiator GERAM)¹²³

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Aceh telah mendapatkan kritik dari masyarakat karena dianggap kurang tepat, kemudian kritik yang disampaikan melalui media sosial tersebut mendapatkan respon balik dari pihak Pemerintah Aceh dengan pencabutan pembatasan jam malam pada tanggal 4 April 2020.

- Transparansi penanganan covid 19.

Pada bulan September 2020, masyarakat memberikan tanggapan mengenai transparansi pengelolaan keuangan terkait covid 19. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai Pemerintah Aceh cenderung tertutup soal anggaran penanganan covid 19. Kondisi ini menjadi indikator paling buruk selama masa pandemi covid 19.

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Hidayatullah, "Jam malam di Aceh, hanya bertahan sepekan" BBC News Indonesia 7 April 2020. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52183377> (pada tanggal 04 Juli 2021)

¹²³ Postingan Facebook Syakya Meirizal 25 Mei 2020. Diakses Melalui https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10217526711744498&id=1377965646 (pada tanggal 7 April 2021)

“Semua lapisan masyarakat mengharapkan tata kelola keuangan terkait Covid-19 harus transparan. Tapi, sampai hari ini pemerintah terkesan sengaja menutupi, baik dana yang dikelola provinsi maupun anggaran yang ditransfer kepada 23 kabupaten/kota berdasarkan Pergub 40 Tahun 2020, sampai hari ini khusus tentang pengelolaan dana Covid-19 Pemerintah Aceh cenderung tertutup, sehingga potensi terjadi disalahgunakan itu sangat besar. Dan ini menjadi indikator paling buruk terhadap tata kelola keuangan selama masa pandemi,” (Alfian, Koordinator MaTA).¹²⁴

Selain itu, respon lainnya dari Hafidh yang merupakan koordinator bidang hukum dan politik Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), berikut tanggapannya melalui postingan akun resmi facebook Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA):

“Anggaran penanganan dampak covid-19 di Provinsi Aceh tersebar diperuntukkan bagi penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yaitu sebesar 2.3 triliun. Kemudian disusul isu kesehatan sebesar Rp. 134,4 miliar dan pemulihan ekonomi sebesar Rp. 19,6 miliar. Melihat fakta ini, kami menilai pemerintah tidak punya strategi dalam penanganan pemulihan dampak ekonomi serta tidak teridentifikasi secara jelas kelompok sasaran yang akan disasar untuk pemulihan dampak ekonomi di Aceh”. (Hafidh koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA))¹²⁵

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Aceh tidak responsif menjawab permasalahan dilapangan, fakta ini menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah Aceh merencanakan penanganan dampak covid 19 dengan baik. Kondisi ini diperparah oleh sikap Pemerintah Aceh yang tidak transparan dalam mengalokasikan anggaran kebutuhan penanganan dampak covid 19 di Aceh, sehingga menimbulkan kritik dan respon dari kalangan masyarakat.

Beberapa kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Aceh menuai banyak kritikan di media sosial saat ini, berbagai respon bermunculan baik melalui media sosial facebook maupun instagram hanya untuk menilai kebijakan

¹²⁴ Alfian, “MaTA: Pemerintah Aceh Cenderung Tertutup Soal Dana Covid-19”. MataAceh.org. 21 September 2020, [Diakses dari <https://mataaceh.org/pemerintah-aceh-cenderung-tertutup-soal-dana-covid-19/> pada tanggal 04 Juli 2021]

¹²⁵ Postingan Facebook Masyarakat Transparansi Aceh, 20 September 2020. Diakses Melalui <https://www.facebook.com/1430444453869138/posts/2711057079141196/> (pada tanggal 20 Juli 2021)

Pemerintah Aceh. Seperti halnya menurut Hafidh (Koordinator MaTA) kebijakan Pemerintah Aceh dinilai tidak serius dalam menangani masalah tersebut. Berikut pernyataan hasil wawancaranya:

*“Sampai saat ini menurut kita masih jauh dari harapan. Ada banyak hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah bahkan merugikan kita bukan menguntungkan. Dari beberapa kebijakan bahkan itu jauh dari data memenuhi hak masyarakat terutama terkait pandemi bahkan respon pemerintah Aceh Gubernur kita sangat lambat”.*¹²⁶

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Aceh masih jalan ditempat, bahkan tidak begitu terlihat oleh masyarakat. Kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah tidak lain hanya aturan yang telah anjurkan dari pihak pemerintah pusat, dan undang-undang yang telah dibuat untuk mengatasi covid-19, seperti anjuran memakai masker, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara, Rizki Ardial menyatakan bahwa:

*“Pemerintah Aceh terlihat kurang serius dalam menanggulangi pandemi, pemerintah seakan hanya menanggulangnya untuk formalitas saja. Bahkan tidak terlihat upaya serius pemerintah dalam penanganan covid-19 di Aceh, untuk masyarakat yang terdampak saja, masih kurang perhatian”.*¹²⁷

Penetapan covid-19 sebagai pandemi menuai reaksi masyarakat beragam. Ada warga yang merasa takut, marah, panik, bingung, dan sedih. Virus Corona membuat warga masyarakat mengalami trauma dan suasana jiwa terancam dan ketakutan (ancaman dan ketakutan). Mengidentifikasi ada empat trauma disebabkan oleh corona virus yaitu: *Pertama*, trauma individu yang muncul dalam bentuk “penarikan sosial” dimana seseorang yang dicurigai tertular corona virus atau korban pemutusan hubungan kerja cenderung mengisolasi dari kelompok dan lingkungan sosial; *Kedua*, trauma individual yang bersifat “histeria”; *Ketiga*,

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Hafidh (Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik) pada Tanggal 22 Januari 2021

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Rizki Ardial (Aktifis GERAM) pada Tanggal 21 Januari 2021

trauma psikologi yang bersifat “Tindakan kekerasan”; dan *Keempat*, trauma psikologi yang berifat “Lampiran kolektif” sebagai respon atas kepanikan massal yang menyenangkan banyak komunitas.¹²⁸

- Pemberian dana hibah kepada OKP

Pemerintah Provinsi Aceh memberikan dana hibah Rp 9,5 miliar untuk penanganan covid 19 kepada 100 organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan. Pemberian dana hibah kepada individu dan kelompok masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Namun, kebijakan tersebut menuai kritik dari publik karena dinilai tidak memiliki pengaruh terhadap penanganan covid 19 di Aceh. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syakya Meirizal melalui akun media sosial facebook, yaitu:

“Nyan ban contoh cara di hambo-hambo peng Rakyat Aceh lam program Dana Hibah Refokusing APBA 15 Milyar untuk OKP dalam rangka Penanggulangan Covid-19. Generasi Muda Demokrat (GMD) merupakan salah satu OKP yang menerima Dana Hibah dari Gubernur Aceh (Ketua Demokrat Aceh) melalui Dispora. Dana itu mereka gunakan untuk kegiatan pelatihan selama 2 hari bagi pengurus dan anggota GMD (droe keu droe) pada tanggal 30-31 Desember 2020 di Hotel Diana. Agenda kejar tayang akhir tahun ini tak lebih hanya sekedar menghambur-hamburkan uang rakyat serta kental praktik nepotisme. Peukeuh na manfaat pelatihan nyan untuk rakyat Aceh? Neubantu jaweub siat. Yang jelaih Dana Bansos 1,5 T untuk rakyat yang kalheuh ditetapkan lam APBA di peubateu, hana dipeucayee. Meunan sit 1.100 boh rumah dhuafa Baitul Mal ka 3 thon di peubateu. Tapi meunyoe keu OKP adak ka akhee thon tetap di peucayee”. (Dalam Bahasa Aceh)

“Begitulah caranya di hambur-hamburkan uang Rakyat Aceh dalam program Dana Hibah Rekofusing APBA 15 miliar untuk OKP dalam rangka penanggulan covid-19. Generasi Muda Demokrat (GMD) merupakan salah satu Okp yang menerima Dana Hibah dari Gubernur Aceh (Ketua Demokrat Aceh) melalui Dispora. Dana itu mereka gunakan untuk kegiatan pelatihan selama dua hari bagi pengurus dan anggota GMD (untuk diri sendiri) pada tanggal 30-31 Desember 2020 di Hotel Diana. Agenda kejar tanyang akhir tahun ini tak lebih

¹²⁸ Darmin Tuwu. (2019) “Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19”. Publicuho. Hal 269

hanya sekedar menghambur-hamburkan uang rakyat serta kental praktik nepotisme. Apakah ada mamfaat pelatihan tersebut untuk rakyat Aceh? Bantu jawab sebentar, yang jelas Dana Bansos 1,5 T untuk rakyat yang sudah ditetapkan dalam APBA di batalkan, tidak dicairkan. Tapi kalau untuk OKP walaupun sudah akhir tahun tetap dicairkan”. (Diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia)¹²⁹

Kemudian Alfian Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) juga menuturkan melalui diskusi “Kupas Tuntas Polemik Dana Hibah OKP” yang diposting di akun facebook Syakya Meirizal berupa video, berikut kutipannya:

“Barangkali secara regulasi pemberian dana hibah tersebut tidak menyalahi tetapi secara kepatutan dapat diperdebatkan. Namun, bertentangan atau tidak kami menunggu audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)”. Alfian Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)¹³⁰

Berdasarkan paparan di atas kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Aceh tentang dana hibah yang diberikan kepada OKP menimbulkan berbagai respon dan kritik dari masyarakat. Kritikan yang dilontarkan oleh *civil society* umumnya menolak kebijakan tersebut karena dianggap merugikan kepentingan rakyat Aceh.

Berdasarkan paparan di atas, diketahui bahwa masyarakat menggunakan sosial media sebagai jalan alternatif untuk memudahkan pikiran dan tujuan dari gerakan sosial masyarakat. Keberhasilan gerakan sosial dengan menggunakan media sosial dapat dilihat dari kalimat yang mudah dipahami dan jelas maksud dan tujuan dari gerakan sosial tersebut. Pada masa pandemi, masyarakat menggunakan media sosial untuk memberikan respon terhadap berbagai kebijakan

¹²⁹ Postingan facebook akun Syakya Meirizal, 1 januari 2020. Diakses melalui https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10219109918963689&id=1377965646 (diakses pada tanggal 23 Juli 2021)

¹³⁰ Postingan facebook akun Syakya Meirizal, 28 januari 2020. Diakses melalui <https://www.facebook.com/syakya.meirizal/videos/10219316960059587/> (diakses pada tanggal 23 Juli 2021)

yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh. Beberapa kritik yang disampaikan melalui media sosial dari masyarakat seperti, pembatasan jam malam, sikap Pemerintah Aceh yang tidak transparan dalam mengalokasikan anggaran kebutuhan penanganan dampak covid 19 di Aceh, kebijakan Pemerintah Aceh masih jalan ditempat, dan kebijakan Pemerintah Aceh tentang dana hibah yang diberikan kepada OKP.

Kritikan tersebut memberikan dampak kepada Pemerintah Aceh seperti mencabut kebijakan pembatasan jam malam. Berdasarkan Maklumat Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh (FORKOPIMDA) tentang pencabutan penerapan jam malam dan percepatan penanganan corona virus disease 2019 yang disahkan 4 April 2020. Setelah Maklumat bersama FORKOPIMDA Aceh itu dicabut, Pemerintah Aceh akan kembali pada Peraturan Pusat yaitu PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan covid 19. Artinya, Pemerintah Aceh tetap menghimbau masyarakat untuk menghindari berkumpul secara berkelompok dan memberikan pembatasan sosial.¹³¹

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa media memang dijadikan sarana untuk melakukan berbagai hal, seperti untuk pendidikan, bahkan perekonomian, apalagi gerakan sosial yang dilakukan secara aktif melalui media. Gerakan sosial dalam masyarakat memiliki perubahan pada masa pandemi dimana masyarakat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melakukan aksi-aksi gerakan sosial. Masyarakat juga menyampaikan kritik melalui media sosial terhadap kebijakan Pemerintah Aceh seperti, kritik terhadap pemberlakuan jam

¹³¹ Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPPA) Berita Resmi “Penerapan Jam Malam di Aceh Resmi Dicabut.4 April 2020

malam, sikap Pemerintah Aceh yang tidak transparan dalam mengalokasikan anggaran kebutuhan penanganan dampak covid 19 di Aceh, kebijakan Pemerintah Aceh masih jalan ditempat, dan kebijakan Pemerintah Aceh tentang dana hibah yang diberikan kepada OKP. Kritikan tersebut memberikan dampak kepada Pemerintah Aceh seperti mencabut kebijakan pembatasan jam malam.

4.3 Peran *civil society* dalam mengelola media digital

Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationship*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan presiden melalui media sosial guna menyampaikan saran kritik dan ide yang membangun. Jika dalam metode konvensional masyarakat harus menjadi wakil rakyat atau anggota DPR terlebih dahulu dan atau melakukan demonstrasi di depan istana kepresidanan guna menyampaikan aspirasi, sekarang cara tersebut cenderung ditinggalkan.¹³²

Platform Digital dan Responnya

Informasi yang disebar melalui media sosial itu sangat berguna untuk masyarakat. Dengan informasi tersebut masyarakat mudah memperolehnya dari media sosial. Kemudian mudah juga bagi masyarakat untuk mengkritik jika berita

¹³² Anang Sugeng Cahyono (2016) “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia” Jurnal Publiciana 9 (1), 140-157, 2016.

itu tidak sesuai dengan kebijakan yang pemerintah. Masyarakat kini juga mudah menggunakan media sosial untuk mengkritik atau melakukan aksi dengan media sosial. Ada beberapa media sosial yang bisa untuk melakukan gerakan sosial seperti, facebook dan instagram.

Facebook

Facebook yaitu jejaring sosial untuk memperluas pertemanan, layanan mencakup events, games, dan personal messaging, dan berbagi link dan video. Pengguna dapat mem-*follow* sesama pengguna, berbagi link, memberikan komen atau respon terhadap akun individu maupun korporasi.

Pada masa pandemi, peran *civil society* dalam penggunaan media sosial facebook dimanfaatkan untuk menyuarakan keluhan masyarakat mengenai aturan-aturan yang di terapkan pemerintah selama pandemi COVID-19. Berikut merupakan salah satu bentuk konten yang terdapat pada akun media sosial facebook dengan nama Hafidh Polem yang merupakan Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) pada 14 September 2020:

“Angka positif covid -19 semakin tinggi, tingkat keterbukaan informasi anggaran dan langkah penanganan oleh Pemerintah Aceh semakin rendah.”¹³³

Selanjutnya, pengguna facebook dengan nama akun Alfian HS yang merupakan koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengunggah pada tanggal 3 April 2020. Berikut merupakan postingan yang diunggah:

¹³³ Postingan Facebook Hafidh Polem 14 September 2020, diakses melalui https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=10220931445588884&id=1623008273&_rdc=1&_rdr (diakses pada 16 Juli 2021)

“Pemerintah Aceh hanya mengeluarkan beberapa kebijakan dalam bentuk intruksi maupun keputusan gubernur. Kebijakan yang dimaksud belum sama sekali memutuskan langkah konkret penanganan wabah serta dampak sosial ekonomi masyarakat yang ditimbulkan secara menyeluruh”¹³⁴

Akun facebook Syakya Meirizal Inisiator Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GERAM) juga mengunggah postingan gambar yang berisi kritikan terhadap pemerintah 5 September 2020. Berikut merupakan postingan yang diunggah:



Akun facebook Syakya Meirizal juga menuliskan postingan lainnya mengenai kritik terhadap pemerintah. Berikut merupakan tulisan yang diposting:

“Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh positif covid. Siapa bisa jamin ke para pejabat dan ribuan ASN yang ikut gebrak masker bukan OTG yang bisa saja jadi penyebar corona ke

¹³⁴ Postingan Facebook Alfian HS 3 April 2020, diakses melalui https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=2907305479348076&id=100002059575415&fnsn=wiwspwa& rdc=1& rdr (diakses pada 16 Juli 2021)

seluruh Aceh.”¹³⁵

Postingan tersebut menuai banyak respon dari pengguna facebook lainnya. Salah satu komentar pada postingan tersebut yang berasal dari akun facebook dengan nama akun Teuku Irwan Djohan, yaitu:

“Cukop gawat pejabat-pejabat lam pemerintah Aceh jino, Meu’ah tapeugah lagee si puntong meuteumeung jaroe, han tom kalon sapeu” (Bahasa Aceh)

“Cukup gawat pejabat-pejabat dalam Pemerintah Aceh sekarang, maaf cakap seperti si puntong yang menemukan tangan, tidak pernah melihat apa-apa” (Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia)¹³⁶

Durasi Postingan

Penggunaan media sosial facebook dan instagram selama masa pandemi dimanfaatkan masyarakat sebagai suatu gerakan *civil society* untuk mengkritik kinerja pemerintah dalam menangani wabah. Durasi postingan yang diunggah dalam media sosial facebook dan instagram pun beragam.

Pada media sosial facebook, kebanyakan masyarakat mengunggah tulisan saja dan beberapa lainnya mengunggah foto, video, atau sekedar membagikan postingan yang sebelumnya telah diposting orang lain untuk dipublikasikan pada halaman berandanya. Instagram digunakan

¹³⁵ Postingan Facebook Syakya Meirizal 5 September 2020, diakses melalui https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=10218340096438607&id=1377965646&rdc=1&rdr (diakses pada 16 Juli 2021)

¹³⁶ Postingan Syakya Meirizal pada 1 September 2020, diakses melalui https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=10218313559215193&id=1377965646 (diakses pada 16 Juli 2021)

masyarakat untuk mengkritik kinerja pemerintah dengan mengunggah foto beserta *caption* atau mengunggah video yang bertujuan sama.

Jumlah Postingan

Selama masa pandemi, penggunaan media sosial seperti facebook dan instagram mengalami peningkatan. Berdasarkan data Facebook, total pesan pada platform baik Messenger, Instagram, maupun WhatsApp naik lebih dari 50% pada Maret dibandingkan bulan lalu. Facebook juga mengklaim panggilan grup yang mencakup tiga atau lebih peserta naik lebih dari 1.000%.¹³⁷

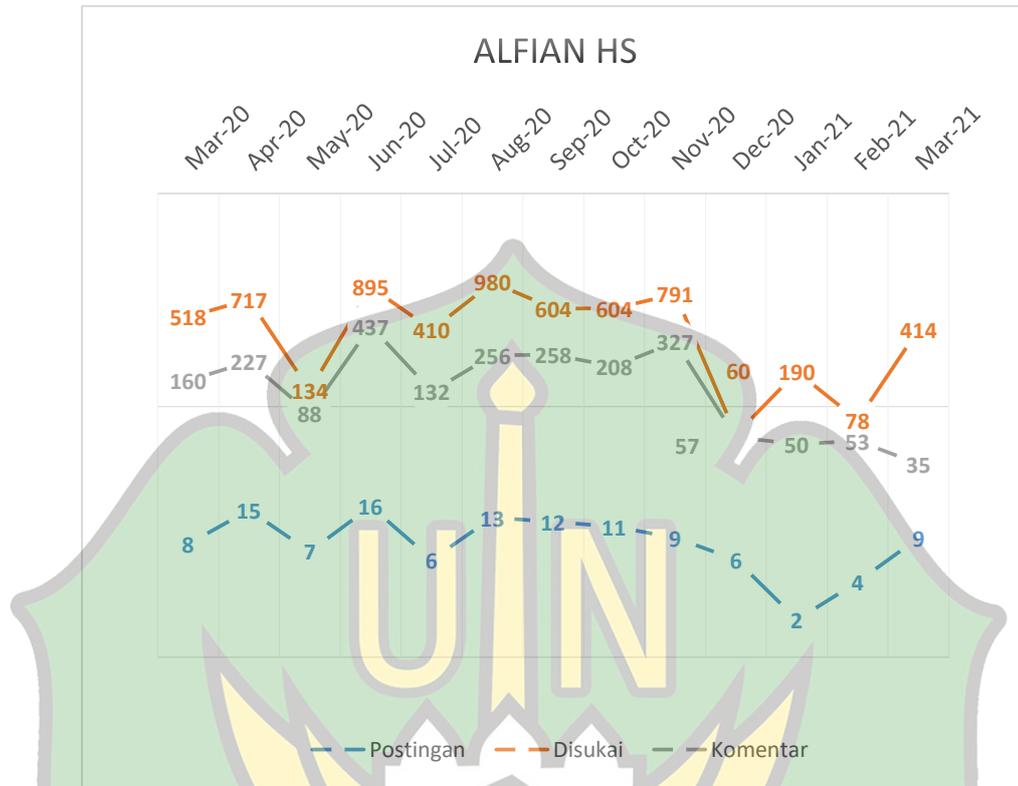
Hal tersebut terjadi karena beberapa negara didunia menerapkan aturan *social distancing* atau *lockdown*. Masyarakat yang membatasi diri untuk berinteraksi secara langsung menggunakan media facebook dan instagram sebagai media komunikasi. Selain itu, masyarakat juga menggunakan media tersebut sebagai sarana untuk memperoleh informasi selama pandemi serta menyuarakan suara rakyat terhadap ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah.

Jumlah Respon (like dan komentar)

Postingan pada media sosial seperti facebook dan instagram tentunya memiliki fitur untuk memberikan respon seperti tombol *like* untuk menyukai postingan atau kolom komentar untuk memberikan respon verbal kepada pemilik postingan. Berikut ini merupakan grafik beberapa pengguna facebook yang menggambarkan jumlah postingan, *like*, dan

¹³⁷ Fahmi Ahmad Burhan (diunggah pada 27 Maret 2020) diakses melalui <https://katadata.co.id/febrinaiskana/digital/5e9a41f84eb85/penggunaan-whatsapp-dan-instagram-melonjak-40-selama-pandemi-corona> (diakses pada 16 Juli 2021)

komentar yang telah di unggah selama bulan maret 2020 sampai bulan maret 2021:



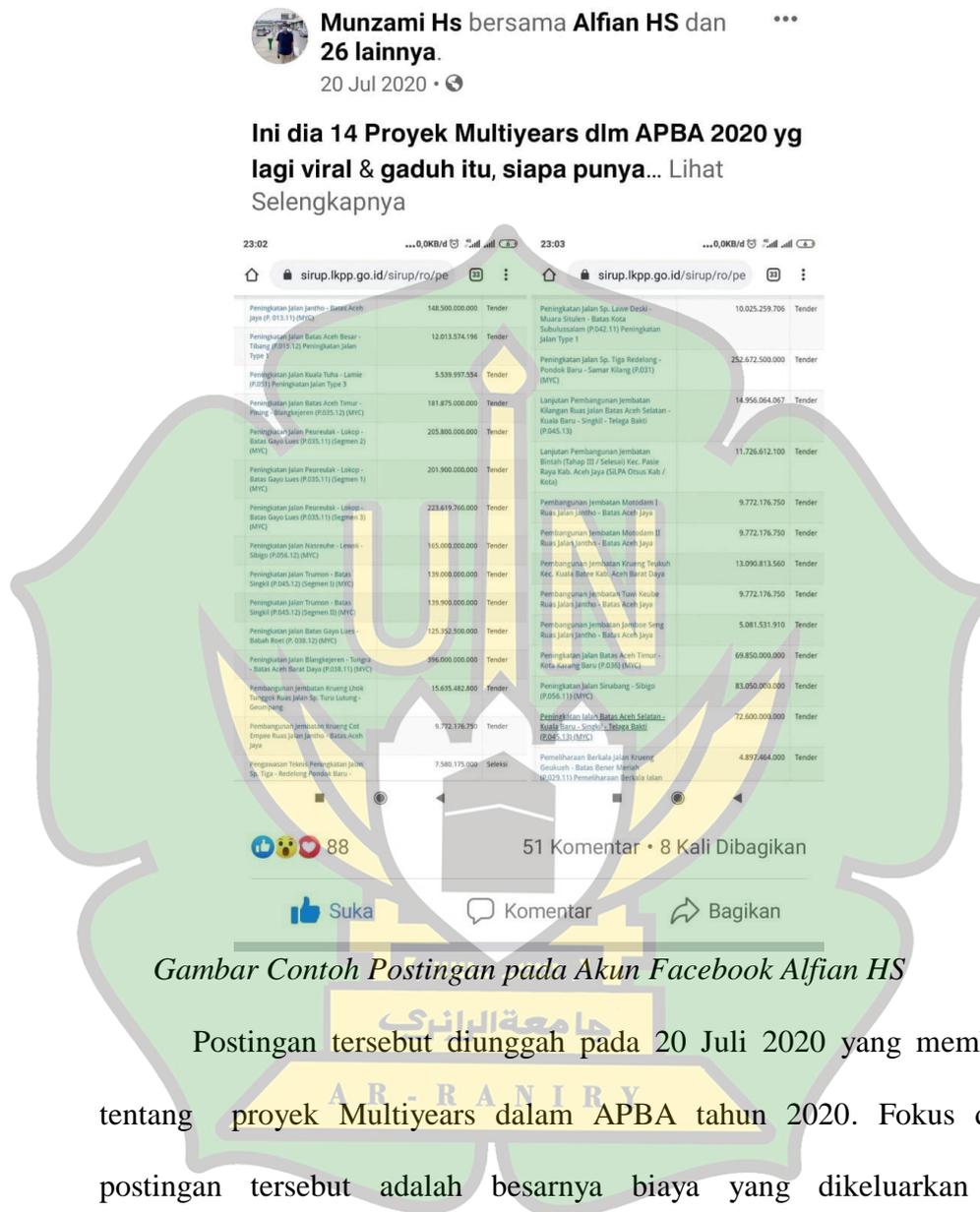
Grafik. 1 Jumlah postingan, like, & komentar akun facebook Alfian

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa jumlah postingan terbanyak adalah pada bulan Juni 2020 yaitu sebanyak 16 postingan. Jumlah *like* terbanyak adalah pada bulan Agustus 2020 dimana sebanyak 980 kali postingannya disukai. Sementara jumlah komentar terbanyak adalah pada bulan Juni 2020 yaitu sebanyak 437 komentar.¹³⁸

¹³⁸ Jumlah Postingan, *like*, dan komentar pada akun Alfian HS pada bulan maret 2020 sampai maret 2021. Diakses melalui <https://web.facebook.com/alfian.hs.5> (diakses pada 16 Juli 2021)

Berikut ini merupakan salah satu postingan pada akun facebook

Alfian HS:



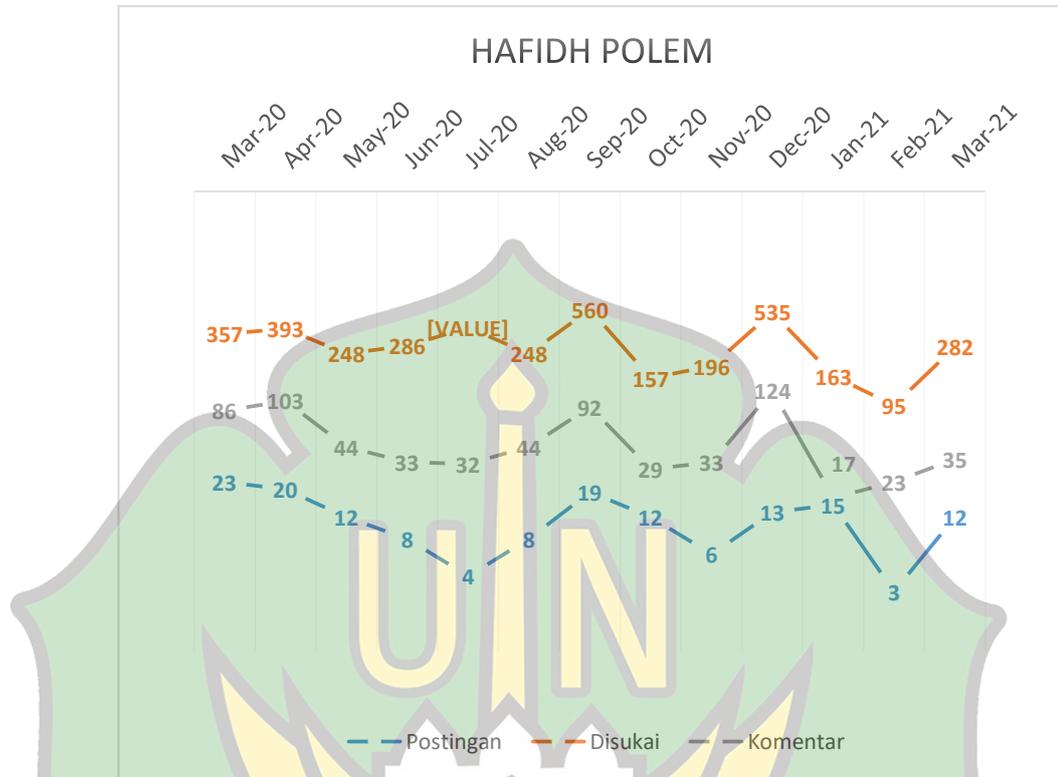
Gambar Contoh Postingan pada Akun Facebook Alfian HS

Postingan tersebut diunggah pada 20 Juli 2020 yang membahas tentang proyek Multiyears dalam APBA tahun 2020. Fokus dalam postingan tersebut adalah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh yaitu sebanyak Rp. 2,402 triliun. Postingan tersebut memperoleh 87 like dan 51 komentar.¹³⁹ Berikut salah satu komentarnya:

“ini sungguh sangat miris, di tengah situasi saat ini dipaksakan. kita mendukung pembangunan, tapi pembangunan dengan proses pengkondisian anggaran itu sama saja ingin menyiksa rakyat. silahkan

¹³⁹ Postingan pada akun Alfian HS pada 20 Juli 2020. Diakses melalui <https://web.facebook.com/1790163752/posts/10214288885574607/> (diakses pada 28 Juli 2021)

saja melakukan pengecekan siapa dan bagaimana relasi dari hilir sampai hulu akan ketemu”. (Komentar Hayatullah Khumaini pada postingan Alfian HS)



Grafik. 2 Jumlah postingan, like, dan komentar pada akun facebook Hafidh Polem

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa jumlah postingan terbanyak di akun facebook Hafidh Polem adalah pada bulan Maret 2020 yaitu sebanyak 23 postingan. Jumlah *like* terbanyak adalah pada bulan September 2020 dimana pada bulan tersebut postingannya mendapatkan 560 *like*. Sementara jumlah komentar terbanyak terdapat pada postingan selama bulan Desember 2020 dimana mendapatkan 124 komentar pada postingannya.¹⁴⁰

Berikut ini merupakan contoh salah satu postingan pada akun facebook Hafidh Polem:

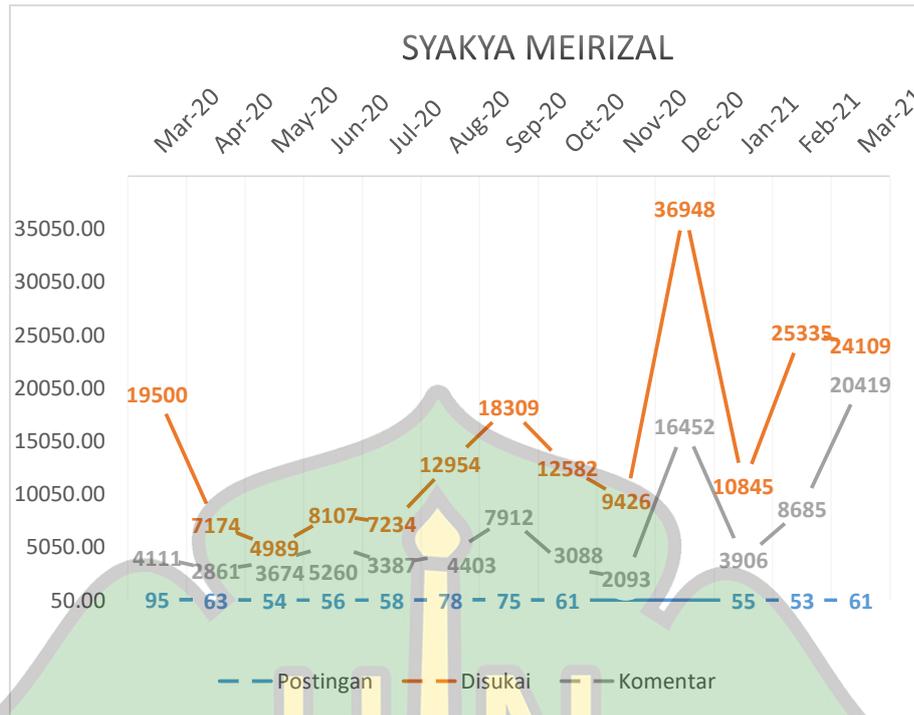
¹⁴⁰ Jumlah Postingan, *like*, dan komentar pada akun Hafidh Polem pada bulan maret 2020 sampai maret 2021. Diakses melalui <https://mobile.facebook.com/hafidh.polem> (diakses pada 16 Juli 2021)



Postingan tersebut diunggah pada 14 September 2020 yang membahas tentang tingginya angka positif covid-19 di Aceh dan rendahnya transparansi anggaran dan langkah penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Postingan tersebut memperoleh 77 *like* dan 11 komentar.¹⁴¹ Berikut salah satu komentarnya:

“Jubir Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani hanya mengumumkan update korban covid setiap hari, tidak pernah update upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh dan rincian penggunaan dana refocusing Rp 2,4 Triliun itu” (Komentar Jalimin Gayo pada Postingan Hafidh Polem)

¹⁴¹ Postingan pada akun Hafidh Polem pada 14 September 2020. Diakses melalui <https://www.facebook.com/1623008273/posts/10220931445588884/?app=fbl> (diakses pada 28 Juli 2021)

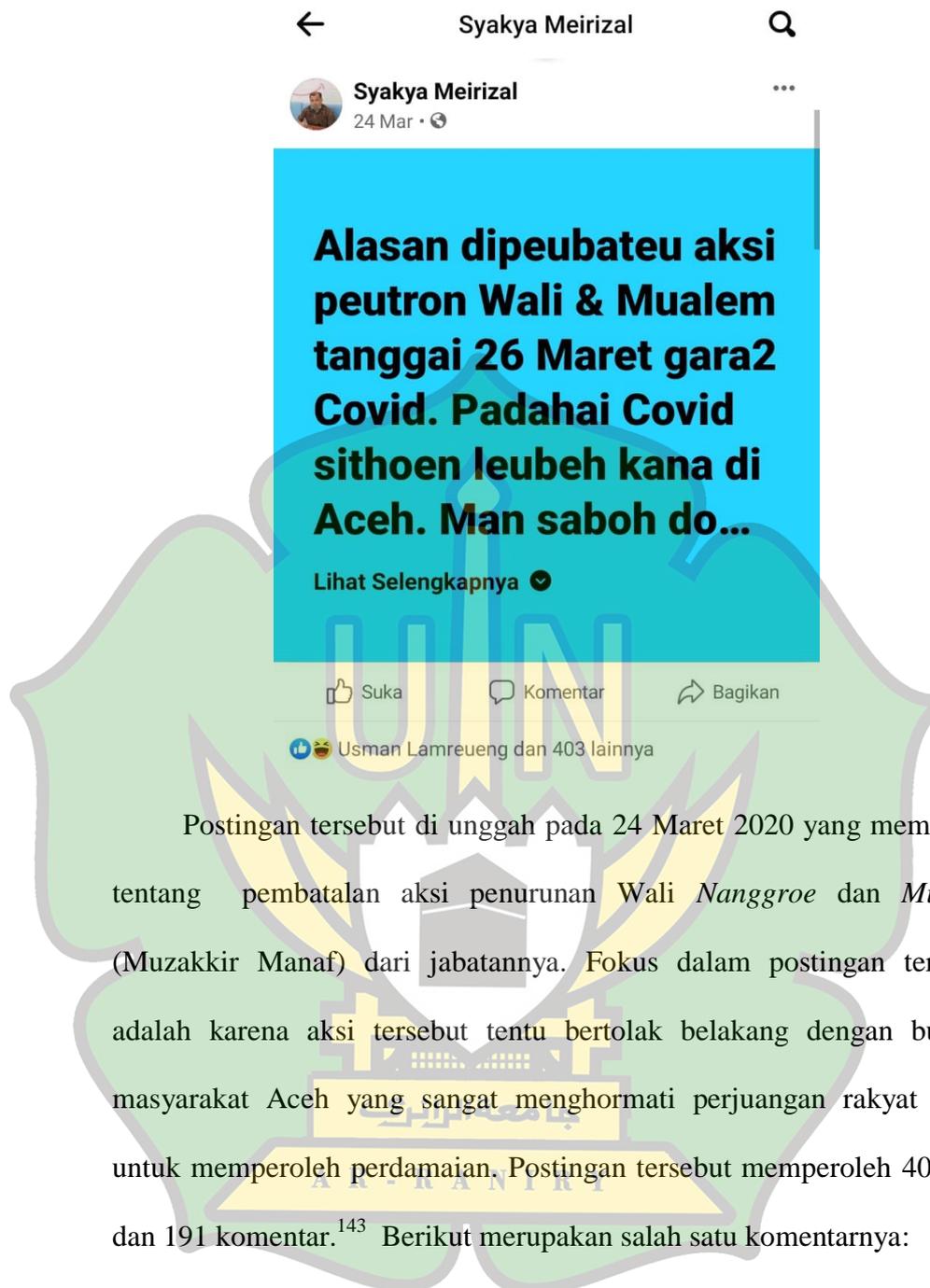


Grafik. 3 Jumlah Postingan, like, dan komentar pada akun facebook Syakya Meirizal

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa jumlah postingan terbanyak pada akun tersebut adalah pada bulan Maret 2020 dimana terdapat 95 postingan yang diunggah. Jumlah postingan yang memperoleh *like* adalah postingan pada bulan Desember 2020 dimana terdapat 36.948 *like* pada postingannya. Sementara itu, jumlah kometar terbanyak adalah pada bulan Maret 2021 dimana terdapat 20.419 kometar pada postingannya.¹⁴²

Berikut ini merupakan contoh salah satu postingan pada akun facebook Syakya Meirizal:

¹⁴² Jumlah Postingan, *like*, dan komentar pada akun Syakya Meirizal pada bulan maret 2020 sampai maret 2021. Diakses melalui <https://web.facebook.com/syakya.meirizal> (diakses pada 16 Juli 2021)



Postingan tersebut di unggah pada 24 Maret 2020 yang membahas tentang pembatalan aksi penurunan Wali *Nanggroe* dan *Mualem* (Muzakkir Manaf) dari jabatannya. Fokus dalam postingan tersebut adalah karena aksi tersebut tentu bertolak belakang dengan budaya masyarakat Aceh yang sangat menghormati perjuangan rakyat Aceh untuk memperoleh perdamaian. Postingan tersebut memperoleh 404 *like* dan 191 komentar.¹⁴³ Berikut merupakan salah satu komentarnya:

“Watee su rudok sang2 itoh ujeun..rupajih angen ipot..perseh lagee compresor su uberaya oh itubiet anggen mndum”.

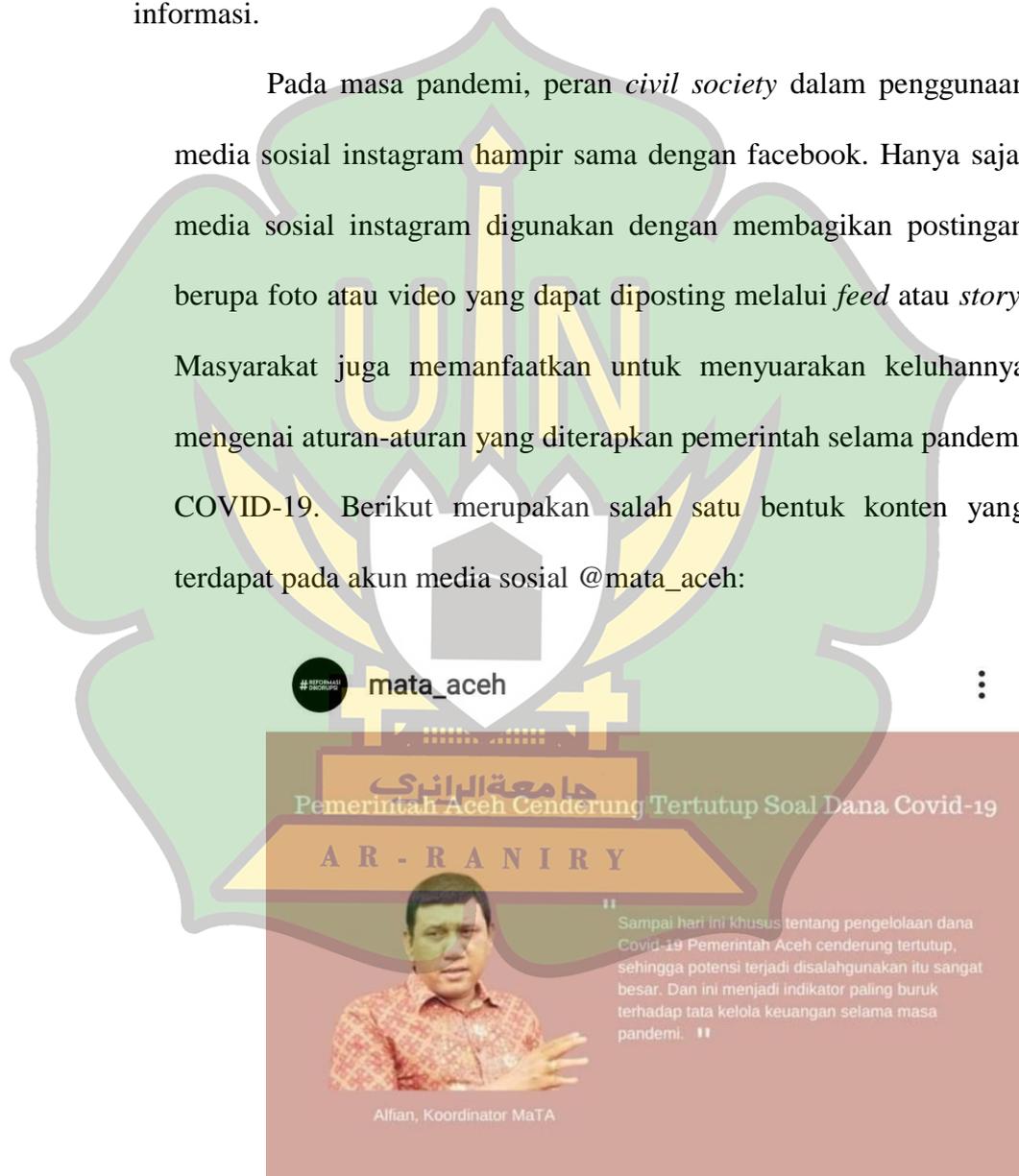
“ketika suara gemuruh seperti turun hujan, rupanya angin. Persis seperti kompresor yang besar suara padahal yang keluar angin semua”
(Komentar M Isa Jalil pada postingan Syakya Meirizal)

¹⁴³ Postingan pada akun Syakya Meirizal pada 24 Maret 2021. Diakses melalui https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=10219675649786606&id=1377965646&_rdc=1&_rdr (diakses pada 28 Juli 2021)

Instagram

Instagram adalah sebuah bentuk dari *new media* (media baru) untuk berbagi foto dan video, menyediakan pengguna untuk mengambil foto dan video dengan menerapkan filter digital serta memberikan keterangan yang sering disebut caption dan pengguna dapat berbagi informasi.

Pada masa pandemi, peran *civil society* dalam penggunaan media sosial instagram hampir sama dengan facebook. Hanya saja, media sosial instagram digunakan dengan membagikan postingan berupa foto atau video yang dapat diposting melalui *feed* atau *story*. Masyarakat juga memanfaatkan untuk menyuarakan keluhannya mengenai aturan-aturan yang diterapkan pemerintah selama pandemi COVID-19. Berikut merupakan salah satu bentuk konten yang terdapat pada akun media sosial @mata_aceh:



Postingan tersebut juga memuat keterangan (*caption*) yang

berisi:

“Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai Pemerintah Aceh cenderung tertutup soal anggaran penanganan Covid-19. Kondisi ini, menurut MaTA, menjadi indikator paling buruk selama masa pandemi Covid-19.”¹⁴⁴

Akun instagram @mata_aceh juga mengunggah postingan pada 24 September 2020 mengenai kritik terhadap Pemerintah Aceh dalam mengelola anggaran penanganan dampak covid-19. Berikut merupakan postingan dari akun tersebut:



Postingan tersebut juga dilengkapi dengan keterangan (*caption*) yang menjelaskan maksud dari postingan tersebut. Berikut merupakan isi keterangan dari postingan tersebut:

"Anggaran penanganan dampak covid-19 di Provinsi Aceh terbesar diperuntukkan bagi penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yaitu sebesar 2,3 triliun. Kemudian disusul isu kesehatan sebesar Rp. 134,4 milyar dan pemulihan ekonomi sebesar Rp. 19,6 milyar" - Hafidh, Koordinator Bidang Hukum dan Politik - MaTA¹⁴⁵

¹⁴⁴ Postingan instagram @mata_aceh pada tanggal 21 September 2020 diakses melalui: https://www.instagram.com/p/CFX7RbPHtC3/?utm_medium=share_sheet diakses pada (16 Juli 2021)

¹⁴⁵ Postingan instagram @mata_aceh pada tanggal 24 September 2020 diakses melalui: https://www.instagram.com/p/CFfuQTPHALV/?utm_medium=share_sheet (diakses pada 16 Juli 2021)

Selanjutnya, pengguna instagram dengan nama akun @syakymeirizal juga melontarkan kritikan terhadap kinerja Pemerintah Aceh selama masa pandemi. Postingan tersebut berupa unggahan video yang diunggah pada media IGTV. Video berdurasi 4 menit 55 detik tersebut berisi kritikan tajam terhadap kinerja Gubernur Provinsi Aceh yang dinilai tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Video tersebut telah ditonton lebih dari 300 kali oleh pengguna instagram lainnya. Pada keterangan video tersebut, pemilik akun @syakymeirizal juga menuliskan beberapa kalimat pendukung isi video. Berikut merupakan isi *caption* dari postingan tersebut:

*“Tak Salurkan Bansos 1,5 T, Gubernur Nova Pengkhianat Rakyat Aceh!”
“Hak rakyat Aceh dalam Bansos 1,5 trilyun hana ditunaikan atawa dipeubateu oleh Pemerintah Aceh. Maka GUBERNUR NOVA ngon SEKDA TAQWA nakeuh sidroe PENGUASA dan PEJABAT ZALEM. Seureuta PENGKHIANAT ateuh naseb rakyat dan BANGSA ACEH!!!”¹⁴⁶*

Hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa penggunaan media sosial facebook dan instagram di kalangan masyarakat memiliki peran tersendiri untuk merespon kebijakan selama masa pandemi covid-19. Postingan tersebut berasal dari berbagai elemen masyarakat dengan respon yang beragam berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Masyarakat lainnya juga memberikan andil dengan banyaknya jumlah *like* pada postingan tersebut atau bahkan secara langsung memberikan komentar pada postingan yang berisi kritikan terhadap Pemerintah Aceh.

¹⁴⁶ Postingan Instagram @syakymeirizal pada 1 Desember 2020 diakses melalui: https://www.instagram.com/tv/CIPxSUAHVVC/?utm_medium=share_sheet (diakses pada 16 Juli 2021)

Berdasarkan hasil penelitian pada bagian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa media sosial memberikan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationship*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*). Masyarakat kini juga mudah menggunakan media sosial untuk mengkritik atau melakukan aksi dengan media sosial. Ada beberapa media sosial yang bisa untuk melakukan gerakan sosial seperti, facebook dan instagram. Pada masa pandemi, peran *civil society* dalam penggunaan media sosial facebook dimanfaatkan untuk menyuarakan keluhan masyarakat mengenai aturan-aturan yang diterapkan pemerintah selama pandemi COVID-19 dimana kebanyakan masyarakat mengunggah tulisan saja dan beberapa lainnya mengunggah foto, video, atau sekedar membagikan postingan yang sebelumnya telah di posting orang lain untuk dipublikasikan pada halaman berandanya. Sementara itu, instagram digunakan masyarakat untuk mengkritik kinerja pemerintah dengan mengunggah foto beserta caption atau mengunggah video yang bertujuan sama.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa data dalam penelitian ini tentang *new media* dan transformasi gerakan sosial terhadap kebijakan Pemerintah Aceh di era pandemi covid-19. Sesuai dengan pertanyaan rumusan masalah yaitu mengenai transformasi pergerakan *civil society* di era pandemi covid 19 telah mengalami perubahan. Sebelum masa pandemi, gerakan-gerakan sosial dilakukan secara konvensional. Di era pandemi, gerakan-gerakan sosial dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan menggunakan alternatif media sebagai sarana melakukan aksi-aksi gerakan sosial. Selanjutnya, *civil society* berperan dalam mengelola *new media* untuk mengorganisir transformasi gerakan sosial di era pandemi covid 19. Dalam penelitian ini, peran masyarakat dapat dilihat dari keaktifan beberapa akun media sosial facebook dan instagram yang dijadikan sebagai objek penelitian.

New media dan transformasi gerakan sosial terhadap kebijakan Pemerintah Aceh di era pandemi covid-19. Hadirnya *new media* bagi *civil society* dimanfaatkan sebagai sarana untuk memberikan respon dan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang di terapkan oleh Pemerintah Aceh. Situasi pandemi yang tidak memungkinkan masyarakat melakukan gerakan sosial seperti biasanya dapat ditutupi dengan kehadiran media sosial sebagai alat komunikasi masyarakat dengan pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di kemukakan, maka peneliti dapat merumuskan saran agar transformasi pergerakan *civil society* di era pandemi covid 19 dapat memberikan peran sebagai pemberi respon terdepan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Aceh. Disamping itu, *civil society* diharapkan juga berperan dalam mengelola *new media* untuk mengorganisir transformasi gerakan sosial di era pandemi covid 19 sehingga kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Aceh selalu dalam kontrol dan pantauan masyarakat.

Selanjutnya, masyarakat diharapkan mengelola media sosial secara bijak dan aktif untuk menyuarakan berbagai keluhan terhadap berbagai polemik yang ditimbulkan oleh kebijakan yang merugikan masyarakat. Kemudian transformasi gerakan sosial yang dilakukan melalui ruang virtual diharapkan memberikan efek pertimbangan bagi Pemerintah Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Jurnal :

- Adham Nasution, , (1983). *“Sosiologi”*, Alumni, Bandung
- Alfian, (2020). *“MaTA: Pemerintah Aceh Cenderung Tertutup Soal Dana Covid-19”*. MataAceh.org.
- Anang Sugeng Cahyono (2016) *“Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia”* Jurnal Publiciana 9 (1), 140-157, 2016.
- Aoyama, Y, and Castells, M. (2002). *“An Empirical assessment of the Informational Society”*. International Labour Review, 141. Geneva: ILO.
- Ardianto, Soleh Soemirat. (2002). *“Dasar-Dasar Public Relations”*. Cetakan pertama. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Arum Nur Hasanah (2017) *“Transformasi Gerakan Sosial Di Ruang Digital”* Jurnal E-Societas, Jurnal Pendidikan Sosiologi Vol 6, No 6.
- Astuti, S.A. (2013). *Media Sosial Sebagai Ruang Publik Antara Netiket dan Netizen*. Kanal. 1(2): 1-220.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), (2020). *“Laporan Survei Internet APJII 2019-2020 (Q2)”*. Indonesia Survey Center.
- Atmoko Dwi, Bambang. (2012). *“Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel”*. Jakarta: Media Kita
- Azman (2018) *“Penggunaan Media Massa dan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Komunikasi”*. Jurnal Peurawi Vol. 1 No. 1 Tahun 2018
- Bank Indonesia, (2021). *“Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Februari 2021”*.
- BPS Aceh (2019) *“Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh No. 34/08/11/Th.XXIII”*, 3 Agustus 2020
- BPS Aceh (2019) *“Statistik Pendidikan Provinsi Aceh”*. Katalog BPS: 4302002.11.
- BPS Provinsi Aceh (2020). *“Berita Resmi Statistik Indeks Demokrasi Indonesia”*.
- BPS Provinsi Aceh (2021). *“Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data Provinsi Aceh 2020”*, Katalog: 1399013.11
- BPS Provinsi Aceh (2021). *“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh”*. Tahun 2020 No. 04/01/11/XXIV

- BPS Provinsi Aceh (2021). *“Indeks Pembangunan Manusia”*. Katalog: 4102002.11
- Darmin Tuwu. (2019). *“Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19”*. Publichuo.
- Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. (2004). *“Teori konflik sosial ”*. Penerjemah Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, Yogyakarta, Pustaka pelajar.
- Dewi Kartika Sari, Royke R. Siahainenia. (2015). *“Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah”* Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol 12, Nomor 1.
- Djam’ah Satori, (2011). *“Metodelogi Penelitian Kualitatif”*, Alfabeta. Bandung
- Efendi et al. (2017). *“Analisis Pengaruh Penggunaan Media Baru Terhadap Pola Interaksi Sosial Anak Di Kabupaten Sukoharjo”*. Jurnal Penelitian Humaniora. Vol. 18, No. 2
- Effendy, Onong Uchyana. (2000). *“Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi”*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Frommer, Dan. (2011). *“Here’s How To Use Isntagram”*. Business insider
- Greenwood, K., & Jenkins, J. (2015). *“Visual Framing Of The Syrian Conflict In News And Public Affairs Magazines”*. Journalism Studies.
- Istanti, Kun Zachrun. (2010). *“Transformasi dan Integrasi dalam Kesustraan Nusantra: Perbandingan Teks Amir Hamzah Melayu dan Jawa”* dalam *Humaniora: Jurnal Budaya, Sastra, & Bahasa*, Vol. 22
- Kamarudin, S.A. (2012). *“Pemberontakan Petani UNRA 1943 (Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Sulawesi Selatan)”*. Makara Seri Sosial Humaniora.
- Keputusan Presiden No.9 Tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Presiden No.7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)
- Kris H. Timotius, (2017). *”Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan”*, Yokyakarta: Andi
- Kuntowijoyo. (1994). *“Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi”*, Mizan, Bandung.

- Littlejohn, Stephew W. (1999). *“Theories of Human Communication. 6 th Edition. Belmont CA”*: Wadsworth Publishing Company
- Macionis, John J. (2014). *“Sociology”*. New Jersey: Pearson.
- Mansour Fakh, (1966) *“Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial”*, Pustaka Pelajar,
- Mayor Polak, , (1985), *“Sosiologi”*, Ikhtiar Baru Jakarta.
- Mc Quail, Denis. (2006). *“Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar”*. Alih bahasa oleh Agus Dharma dan Aminudin Ram. Jakarta: Erlangga.
- Moh Natzir, (1998) *“Metode Penelitian”*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong Lexy, (2007). *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Moleong, J Lexy. (2004). *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy, (2002). *“Metode Penelitian Kuantitatif”*, Bandung, Remaja Rosdakarya,
- Nana Syaodih Sukmadinata, (2007) *“Metode Penelitian Pendidikan”*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Noorhaidi Hasan. (2006). *“Islam Politik, Teori Gerakan Sosial, dan Pencarian Model Pengkajian Islam Baru Lintas-Disiplin”*. Jurnal Al-Jami‘ah, Vol. 44, No. 1.
- Nurgiyantoro, B. (2010). *“Penilaian Pembelajaran Bahasa”*. Yogyakarta: BPFE Provinsi Aceh 2019 No. 34/08/11/Th.XXIII, 3 Agustus 2020
- Putri, Dibyaeswari Utami.R (2012).A *“Peran Media Baru Dalam Membentuk Gerakan Sosial (Studi Kasus pada Individu Yang Terlibat dalam Indonesia Unite Di Twitter”*. Skripsi s1. Universitas Indonesia.
- Ramma Wisnu Dewantara, Derajad S. Widhyharto, (2015). *“Aktivisme dan Kesukarelawanan dalam Media Sosial Komunitas Kaum Muda Yogyakarta”*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 19, Nomor 1.
- Soerjono Soekanto, (1981) .*“Memperkenalkan Sosiologi”*, Rajawali Press, Jakarta
- Sugiyono, (2011). *“Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif”*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2007). *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*, Bandung: Alfabeta

Suharsimi Arikunto, (1998). *“Prosedur Penelitian”*, Jakarta: Rineka Cipta

Sumber Internet :

Aldevan Fahzian. (2020). *“Warga Demo dan Paparkan 30 Dosa Plt Gubernur Aceh”*. Diakses tanggal 23 september 2020 [<https://www.tagar.id/warga-demo-dan-paparkan-30-dosa-plt-gubernur-aceh>]

Badan Penanggulangan Bencana Aceh, (2020). *“Penerapan Jam Malam di Aceh Resmi Dicabut”*. [diakses pada tanggal 21 september 2020 <https://bpba.acehprov.go.id/index.php/news/read/2020/04/04/696/penerapan-jam-malam-di-aceh-resmi-dicabut.html>]

BBC News Indonesia 7 April 2020. *“Jam malam, dilema pengendalian Covid-19 dan kebijakan 'terburu-buru yang luput mengukur dampak ekonomi”*. Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52183377> (pada tanggal 20 Juni 2020)

Dwi R. Hapsari. *“Peran Media Baru Dalam Perkembangan Gerakan Social”*. Demokrasi Dalam Ruang Virtual, Vol. 1, No. 2, Oktober 2011. Di akses dari:[<https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/81832/Peran%20Media%20Baru%20dalam%20perkembangan%20gerakan%20sosial.pdf;jsessionid=49233EF0443BFA21BC53B873F2BAB932?sequence>] pada tanggal 4 juli 2020

Fahmi Ahmad Burhan, 2020. diakses melalui <https://katadata.co.id/febrinaiskana/digital/5e9a41f84eb85/penggunaan-whatsapp-dan-instagram-melonjak-40-selama-pandemi-corona> (diakses pada 16 Juli 2021)

Google Berita. 6 Oktober 2020. *“Statistik Penyebaran Covid 19”*. Diakses tanggal 7 oktober 2020 [https://news.google.com/covid19/map?hl=id&mid=%2Fm%2F016wj_&gl=ID&ceid=ID%3Aid]

Hidayatullah, *“Jam malam di Aceh, hanya bertahan sepekan”* BBC News Indonesia 7 April 2020, Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52183377> (pada tanggal 04 Juli 2021)

Jamie Ducharme, (2020). *“World Health Organization Declares COVID-19 a 'Pandemic.' Here's What That Means”*, Diakses dari <https://time.com/5791661/who-coronaviruspandemic-declaration/> (pada 19 April 2020).

Jumlah Postingan, like, dan komentar pada akun Alfian HS pada bulan maret 2020 sampai maret 2021. Diakses melalui <https://web.facebook.com/alfian.hs.5> (diakses pada 16 Juli 2021)

Jumlah Postingan, like, dan komentar pada akun Hafidh Polem pada bulan maret 2020 sampai maret 2021. Diakses melalui <https://mobile.facebook.com/hafidh.polem> (diakses pada 16 Juli 2021)

Jumlah Postingan, like, dan komentar pada akun Syakya Meirizal pada bulan maret 2020 sampai maret 2021. Diakses melalui <https://web.facebook.com/syakya.meirizal> (diakses pada 16 Juli 2021)

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 17 april 2020. Di akses tanggal 1 oktober 2020 [https://www.kominfo.go.id/content/detail/25881/penggunaan-internet-naik-40-saat-bekerja-dan-belajar-dari-rumah/0/berita_satker]

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020. Diakses melalui <https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/409744c5-70a2-4f42-bf3c-7cfd4f22085c> (diakses pada 16 Juli 2021).

Porta, Donatella Della. "*Social movements in times of pandemic: another world is needed*", March 26, 2020. Di akses melalui <https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/social-movements-times-pandemic-another-world-needed/> (pada tanggal 20 September 2020)

Postingan facebook akun Syakya Meirizal, 1 januari 2020. Diakses melalui https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10219109918963689&id=1377965646 (diakses pada tanggal 23 Juli 2021)

Postingan facebook akun Syakya Meirizal, 28 januari 2020. Diakses melalui <https://www.facebook.com/syakya.meirizal/videos/10219316960059587/> (diakses pada tanggal 23 Juli 2021)

Postingan Facebook Alfian HS 3 April 2020, diakses melalui https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=2907305479348076&id=100002059575415&sfnsn=wiwspwa&_rdc=1&_rdr (diakses pada 16 Juli 2021)

Postingan Facebook Hafidh Polem 14 September 2020, diakses melalui https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=10220931445588884&id=1623008273&_rdc=1&_rdr (diakses pada 16 Juli 2021)

Postingan Facebook Masyarakat Transparansi Aceh, 20 September 2020. Diakses Melalui

<https://www.facebook.com/1430444453869138/posts/2711057079141196/> (pada tanggal 20 Juli 2021)

Postingan Facebook Syakya Meirizal 25 Mei 2020. Diakses Melalui https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10217526711744498&id=1377965646(pada tanggal 7 April 2021)

Postingan Facebook Syakya Meirizal 5 September 2020, diakses melalui https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=10218340096438607&id=1377965646&_rdc=1&_rdr (diakses pada 16 Juli 2021)

Postingan instagram @mata_aceh pada tanggal 21 September 2020 diakses melalui:
https://www.instagram.com/p/CFX7RbPHtC3/?utm_medium=share_sheet diakses pada (16 Juli2021)

Postingan instagram @mata_aceh pada tanggal 24 September 2020 diakses melalui:
https://www.instagram.com/p/CFfuQTPHALV/?utm_medium=share_sheet (diakses pada 16 Juli2021)

Postingan Instagram @syakymeirizal pada 1 Desember 2020 diakses melalui:
https://www.instagram.com/tv/CIPxSUAHVVc/?utm_medium=share_sheet (diakses pada 16 Juli2021)

Postingan pada akun Alfian HS pada 20 Juli 2020. Diakses melalui <https://web.facebook.com/1790163752/posts/1021428885574607/> (diakses pada 28 Juli 2021)

Postingan pada akun Hafidh Polem pada 2 Juni 2020. Diakses melalui https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=10220102324501375&id=1623008273&_rdc=1&_rdr (diakses pada 28 Juli 2021)

Postingan pada akun Syakya Meirizal pada 24 Maret 2021. Diakses melalui https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=10219675649786606&id=1377965646&_rdc=1&_rdr (diakses pada 28 Juli 2021)

Postingan Syakya Meirizal pada 1 September 2020, diakses melalui https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=10218313559215193&id=1377965646 (diakses pada 16 Juli 2021)

Profil Provinsi Aceh diakses melalui <https://ppid2.acehprov.go.id/v2/pages/pd> (diakses pada 16 Juli 2021)

Rahayu, Lisye Sri. (2020). *“Usai Dikritik, Pemprov Aceh Evaluasi Kebijakan Jam Malam di Masa Pandemi Corona”*.. [di akses pada tanggal 20 september 2020 <https://news.detik.com/berita/d-4964661/usai-dikritik-pemprov-aceh-evaluasi-kebijakan-jam-malam-di-masa-pandemi-corona>]

Sihabudin, Ahmad. (2017). "*Mediamorfosis Pers di Era Digital*". Diakses melalui <http://epaper.kabar-banten.com/read.php?page=20170215> (pada tanggal 16 maret 2017)

Taqwadin A, Danil, (2020). "*New Normal & Masa Depan Gerakan Sipil di Aceh*". Bagbudig, Diakses melalui <https://bagbudig.com/new-normal-masa-depan-gerakan-sipil-di-aceh/> (pada tanggal 20 Juni 2020)

Sumber Hasil Wawancara :

Hasil wawancara dengan bapak Reza Idria (pakar sosial) pada Tanggal 24 Januari 2021

Hasil wawancara dengan bapak Thamren Ananda (penasehat Gubernur) pada Tanggal 22 Januari 2021

Hasil wawancara dengan bapak Zulkarnaini (Pegiat Media) pada Tanggal 16 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Hafidh (Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik) pada Tanggal 22 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Rizki Ardial (Aktifis GERAM) pada Tanggal 21 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Sulthan Al-Farabi (Pegiat New Media) pada Tanggal 20 Januari 2021



INSTRUMENT PENELITIAN**Identitas Responden :**

Nama :
Usia :
Jabatan :
Tanggal Wawancara :
Informan : MaTA (Masyarakat Tranparansi Aceh)

No	Pertanyaan Penelitian	Pendapat Responden	Keterangan
1.	Bagaimana Bapak/Ibu melihat persoalan gerakan sosial masyarakat di Aceh?		
2.	Seperti yang kita ketahui, sejak tahun 2019 dunia dilanda Pandemi Covid 19 termasuk Provinsi Aceh. Yang mempengaruhi arah kebijakan pemerintah apakah hal tersebut berdampak pada transformasi apakah hal tersebut gerakan sosial di Aceh?		
3.	Pada konteks saat ini, terlihat pergeseran dimana gerakan kritik sudah menggunakan dunia maya, bagaimana pandangan bapak/ibu?		
4.	Bagaimana pendapat Saudara/i pemanfaatan media oleh masyarakat (<i>civil society</i>) dalam melakukan gerakan sosial di Era Pandemi Covid 19 ?		
5.	Facebook, Instagram, dan juga website di gunakan sebagai sarana menyampaikan aspiraasi. Bagaimana seharusnya masyarakat mengorganisir gerakan-gerakan sosial melalui media di Era Pandemi Covid 19?		
6.	Bagaimana pendapat Saudara/i dengan kebijakan Pemerintah Aceh mengenai Pandemi Covid 19?		

7.	Media social apa yang paling sering digunakan oleh anda (CSO) untuk menyuarakan aspirasi dan kritik? Mengapa?		
8.	Bagaimana CSO merespon setiap kebijakan Pemerintah Aceh mengenai Pandemi Covid 19?		
9.	Dalam melakukan gerakan sosial di Era Pandemi apakah Saudara/i memanfaatkan media untuk mengornasir aksi-aksi yang dilakukan?		

Identitas Responden :

Nama :
Usia :
Jabatan :
Tanggal Wawancara :
Informan : Pegiat New Media / Media Sosial

No	Pertanyaan Penelitian	Pendapat Responden	Keterangan
1.	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap penggunaan media sosial saat ini?		
2.	Komunikasi melalui media dijadikan sebagai sarana gerakan sosial di Era Pandemi, Bagaimana saudara merespon hal tersebut?		
3.	Pada konteks saat ini, terlihat pergeseran dimana gerakan kritik sudah menggunakan dunia maya, bagaimana pandangan bapak/ibu?		
4.	Menurut Saudara/i apakah masyarakat mempunyai peran dalam mengelola media?		
5.	Facebook, Instagram, dan juga website di gunakan sebagai sarana menyampaikan aspiraasi. Bagaimana seharusnya masyarakat mengorganisir gerakan-gerakan sosial melalui media di Era Pandemi Covid 19?		

6.	Bagaimana pendapat Saudara/i dengan kebijakan Pemerintah Aceh mengenai Pandemi Covid 19?		
7.	Media social apa yang paling sering digunakan oleh anda (CSO) untuk menyuarakan aspirasi dan kritik? Mengapa?		
8.	Bagaimana CSO merespon setiap kebijakan Pemerintah Aceh mengenai Pandemi Covid 19?		
9.	Dalam melakukan gerakan sosial di Era Pandemi apakah Saudara/i memanfaatkan media untuk mengornasir aksi-aksi yang dilakukan?		

Identitas Responden :

Nama :
Usia :
Jabatan :
Tanggal Wawancara :
Informan : **Aktivis GERAM (Gerakan Aceh Menggugat)**

No	Pertanyaan Penelitian	Pendapat Responden	Keterangan
1.	Bagaimana Bapak/Ibu melihat persoalan gerakan sosial masyarakat di Aceh?		
2.	Seperti yang kita ketahui, sejak tahun 2019 dunia dilanda Pandemi Covid 19 termasuk Provinsi Aceh. Yang mempengaruhi arah kebijakan pemerintah apakah hal tersebut berdampak pada transformasi apakah hal tersebut gerakan sosial di Aceh?		
3.	Pada konteks saat ini, terlihat pergeseran dimana gerakan kritik sudah menggunakan dunia maya, bagaimana pandangan bapak/ibu?		
4.	Bagaimana pendapat Saudara/i pemanfaatan media oleh masyarakat (<i>civil society</i>) dalam melakukan gerakan		

	sosial di Era Pandemi Covid 19 ?		
5.	Facebook, Instagram, dan juga website di gunakan sebagai sarana menyampaikan aspirasi. Bagaimana seharusnya masyarakat mengorganisir gerakan-gerakan sosial melalui media di Era Pandemi Covid 19?		
6.	Bagaimana pendapat Saudara/i dengan kebijakan Pemerintah Aceh mengenai Pandemi Covid 19?		
7.	Media social apa yang paling sering digunakan oleh anda (CSO) untuk menyuarakan aspirasi dan kritik? Mengapa?		
8.	Bagaimana CSO merespon setiap kebijakan Pemerintah Aceh mengenai Pandemi Covid 19?		
9.	Dalam melakukan gerakan sosial di Era Pandemi apakah Saudara/i memanfaatkan media untuk mengorganisir aksi-aksi yang dilakukan?		

Identitas Responden :

Nama :
Usia :
Jabatan :
Tanggal Wawancara :
Informan : Dinas Kesehatan Masyarakat

No	Pertanyaan Penelitian	Pendapat Responden	Keterangan
1.	Bagaimana pendapat Saudara/i tentang Covid 19?		
2.	Bagaimana pendapat Saudara/i terkait kesehatan masyarakat(<i>civil society</i>) di Era Pandemi ?		
3.	Sesuai Protokol Kesehatan yang berlaku, Bagaimana Saudari/i Mengorganisir Pergerakan Sosial masyarakat dalam mematuhi Protokol Kesehatan?		
4.	Terkait penyebaran Virus Covid 19, Apakah media menjadi sarana penting untuk penyampaian pencegahan		

	penyebaran virus di masyarakat?		
5.	Apakah saudara/i mengetahui aksi-aksi protes melalui dunia media meningkat drastis saat Pandemi?		

Identitas Responden :

Nama :
Usia :
Jabatan :
Tanggal Wawancara :
Informan : Pakar di Bidang Sosial Movement

No	Pertanyaan Penelitian	Pendapat Responden	Keterangan
1.	Bagaimana transformasi pergerakan sosial di Era Pandemi Covid 19?		
2.	Dengan adanya lockdown. Apakah media mempunyai andil yang besar dalam gerakan sosial ?		
3.	Bagaimana pendapat Saudara/i terhadap gerakan sosial melalui media?		
4.	Peran seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat(<i>civil society</i>) dalam mengelola media di Era Pandemi ?		
5.	Dalam melakukan gerakan sosial di Era Pandemi apakah Saudara/i memanfaatkan media untuk mengorganisir aksi-aksi yang dilakukan?		

Identitas Responden :

Nama :
Usia :
Jabatan :
Tanggal Wawancara :
Informan : Pemerintah Aceh

No	Pertanyaan Penelitian	Pendapat Responden	Keterangan
1.	Bagaimana Pandangan Saudara/i terkait Pandemi Covid 19?		
2.	Langkah yang besar diambil oleh Pemerintahan Aceh saat pandemi yaitu PSBB. Apakah kebijakan tersebut mempengaruhi pergerakan sosial masyarakat (<i>civil society</i>)?		
3.	Adanya kebijakan berlakunya jam malam yang kemudian di cabut karena aksi protes masyarakat (<i>civil society</i>) Bagaimana pihak Pemerintahan menanggapi hal tersebut?		
4.	Masyarakat (<i>civil society</i>) memanfaatkan media sebagai sarana saat Pandemi. Apakah pihak pemerintah juga melakukan hal yang sama?		
5.	Bagaimana Pemerintahan Aceh mengendalikan agar pergerakan sosial tetap memiliki stabilitas?		